Laporan Akhir

Social Mapping

Kecamatan Pasir Sakti Desa Mekarsari

Lampung Timur

Kerjasama antara PT Kinerja Maju Sejahtera dan

Paramadina Management Advisory

Universitas Paramadina Jakarta

Universitas Paramadina Jakarta

2018

KATA PENGANTAR

Laporan Social Mapping Untuk Program CSR hasil kerjasama antara PT Kinerja Maju Sejahtera dan Universitas Paramadina Jakarta mengarahkan pada analisis potensi pengembangan yang bisa dilakukan di wilayah **Kecamatan Pasir Sakti Desa Mekarsari Lampung Timur** yang bidang amatannya berupa lingkungan dan pemberdayaan ekonomi. *Social mapping* ini juga menyajikan luaran yaitu memberikan gambaran umum wilayah, potensi permasalahan dan isu-isu yang ada berupa ***security mapping*** yang bisa menjadi potensi sebagai dasar pengembangan Program CSR PT Kinerja Maju Sejahtera.

Tujuan *social mapping* yang lain adalah memberikan data tokoh yang berperan dalam suksesi program. Laporan *social mapping* ini nantinya juga bisa diharapkan menjadi salah satu rekomendasi program. Laporan ini memaparkan data yang dijadikan pengambilan keputusan dalam merancang Program CSR bidang amatan sebagai fokus sekaligus sebagai salah satu referensi utama dalam penyusunan Rencana Strategis PT Kinerja Maju Sejahtera untuk perumusan Program CSR di masa yang akan datang.

Metode penelitian kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan data yang menggambarkan karakteristik dari seseorang, fenomena atau situasi. Penelitian ini menggunakan data pimer dan data sekunder, yaitu data orisinil hasil dari penelitian atau data mentah tanpa ada tambahan interpretasi dan terjemahan yang mewakili pihak resmi. Dengan selesainya laporan *social mapping* ini diharapkan mampu memenuhi maksud, tujuan dan kebutuhan PT Kinerja Maju Sejahtera dalam upayanya melaksanakan program CSR di tahun yang akan datang. Kami sebagai pihak peneliti yang bertanggung jawab dalam pelaporan ini menyampaikan permohonan maaf sekiranya ternyata masih ditemukan adanya kekurangan dalam pelaporan.

LEMBAR PENGESAHAN

Pengabdian Masyarakat dengan Judul

Penyusunan Laporan Social Mapping Kecamatan Pasir Sakti Desa Mekarsari Lampung Timur

Telah disahkan dan disetujui oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Paramadina, pada:

Hari/Tanggal: Senin 7 Mei 2018

Yang mensahkan dan menyetujui:

Dr. Sunaryo .....

Penyusun:

Dr. Iin Mayasari .....

Dr. Handi Risza Indris, M.Econ .....

Dr. Sunaryo .....

Dr. Fatchiah E. Kertamuda, M.Sc .....

Kurniawaty Yusuf, M.Si .....

Dr. Prima Naomi, MT .....

Drs. Agoes Joesoef, MSi .....

Emil Radhiansyah, MSi .....

Adrian A. Wijanarko, SE, MM .....

Zainul Maarif, Lc. M.Hum .....

Atika Budhi Utami, S.Sos, MIK .....

Handrix Chris Haryanto, MA .....

Jakarta, 7 Mei 2018

DAFTAR ISI

Cover ……1
Kata Pengantar …… 2
Daftar Isi …….. 3
Bab 1. Pendahuluan …… 4
1.1. Pendahuluan …….. 4
1.2. Tujuan Social Mapping …… 5
1.3. Batasan Penelitian ……6
Bab 2. Kerangka Teori ……7
Bab 3. Metode Penelitian dan Pengolahan Data …… 9
3.1. Metode …….. 9
3.2. Rencana Kegiatan Social Mapping……..12
3.3. Outline Pelaporan …….. 12
3.4. Tim Penyusun Social Mapping …… 13
Bab 4. Laporan Awal Terkait Gambaran Umum …… 14
4.1. Gambaran Awal Kabupaten Lampung Timur ……..... 14
4.2. Kecamatan Pasir Mukti ……..... 18
4.3. Desa Mekar Sari ……... 19
4.4. Demografi dan Sosial Budaya Masyarakat …… 20
Bab 5. Analisis Potensi Desa ……..... 24
5.1. Potensi Desa Pasir Mukti …….. 24
5.1.1. Potensi Pertanian, Perkebunan,
Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan ……..... 24
5.1.2. Permasalahan Desa Mekar Sari ……..... 26
Bab 6. Isu Sentral …… 38
6.1. Perbaikan Infrastruktur …….. 38
6.2. Revitalisasi Lahan Galian …… 39
6.3. Pemanfaatan Potensi Pertanian,
Perkebunan dan Peternakan …… 43
6.4. Penguatan Karang Taruna …… 45
Bab 7. Program Corporate Social Responsibility ……...48
7.1. Program Corporate Social Responsibility …….. 48
7.2. Program Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan-PROPER ……... 48
Bab 8. Pemetaan Aktor …… 54
8.1. Aktor …… 54
8.1.1. Deskripsi Posisi Sosial dan Peranan Sosial Aktor ……... 57
8.1.2. Analisis Derajat Kekuatan (Power)
Dan Kepentingan (Interest) Aktor …….. 58
8.1.3. Kelompok Rentan …… 59
8.1.4. Jaringan Sosial ……... 60
Bab 9. Rekomendasi Program …….. 61
9.1. Internal Perusahaan ……...61
9.2. Eksternal Perusahaan ……62
9.3. Usulan Program …….. 63
9.4. Usulan Program Berdasarkan Prioritas Kepentingan …… 66
9.5. Timeline Program Unggulan ……... 68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Perusahaan sebelum menerapkan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan melakukan studi awal terlebih dahulu. Tujuan studi awal ini memiliki manfaat agar pelaksanaan Program CSR bisa mencapai keefektifan dan efisiensi pelaksanaan program. Program bisa memberikan manfaat secara tepat sasaran dan bisa menghemat sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Studi awal ini menggunakan studi *social mapping*. *Social mapping* ini adalah aktivitas untuk memetakan kebutuhan potensial yang perlu dipenuhi oleh perusahaan dan memahami target penerima dengan tepat.

Pelaksanaan *social mapping* terhadap program CSR ini perlu dilakukan karena perusahaan berorientasi secara stratejik dan memiliki kepedulian tanggung jawab sosial oleh entitas bisnis memiliki rangkaian makna. Program CSR yang dilaksanakan tidak hanya sekedar memberi bantuan atau donasi, namun program yang diberikan ini nantinya benar-benar bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat yang menjadi bagian dari Program CSR perusahaan. Program CSR yang dilaksanakan nantinya dapat mendukung kemampuan perusahaan dalam mengelola kegiatan bisnis jangka panjang sekaligus memenuhi UU No. UU PT 40 tahun 2007 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta UU No. 25 tahun 2007 tentang perusahaan yang melakukan penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kegiatan *social mapping* Program CSR merupakan perwujudan orientasi perusahaan pada perspektif *stakeholder*. Perspektif stakeholder ini memfokuskan

pendekatan *relational* pada semua aspek yang mendukung eksistensi perusahaan. Perusahaan harus memiliki kewajiban moral untuk memperhatikan relasi pada semua aspek. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan perspektif *stakeholder*. Artinya, memperhatikan aspek komunitas, lingkungan alam, karyawan, konsumen, pemasok, pemegang saham, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat.

Program CSR yang baik berdasarkan program *social mapping* yang baik akan menaikan citra dan reputasi perusahaan yang berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada perusahaan. Aktivitas dalam program *social mapping* untuk mendukung Program CSR meliputi aspek di semua bidang dalam kehidupan masyarakat yang menjadi bagian dari *stakeholder* perusahaan. Program *social mapping* yang dilakukan adalah memetakan permasalahan dan potensi yang bisa meliputi aspek kesehatan, pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan kehidupan sosial, pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan pengetahuan, perbaikan infrastruktur, penguatan nilai tambah pada kegiatan ekonomi.

1.2. Tujuan Social Mapping

Tujuan *social mapping* yang dilakukan adalah menganalisis potensi pengembangan yang bisa dilakukan di wilayah **Kecamatan Pasir Sakti Desa Mekarsari Lampung Timur**. Bidang amatan adalah sumber daya alam, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, lingkungan hidup, infrastruktur dan sosial.

Social mapping ini juga menyediakan luaran yaitu memberikan gambaran umum wilayah, potensi permasalahan dan isu-isu yang ada. Tujuan *social mapping* yang lain adalah memberikan data tokoh yang berperan dalam suksesi program.

Laporan *social mapping* ini nantinya bisa diharapkan menjadi salah satu rekomendasi program. Laporan ini memaparkan data yang dijadikan pengambilan keputusan dalam merancang Program CSR bidang amatan sebagai fokus sekaligus sebagai salah satu referensi utama dalam penyusunan Rencana Strategis PT Kinerja Maju Sejahtera untuk perumusan Program CSR di masa yang akan datang.

1.3. Batasan Penelitian

a. Periode Penelitian. Penelitian mulai dilakukan pada bulan Maret 2018. Pengambilan data dilakukan satu bulan di lapangan dengan cara wawancara, observasi dan *focus group discussion* pada pihak terkait serta menggunakan data sekunder yang diberikan oleh aparat pemerintah desa.

b. Lokasi Penelitian. Lokasi penelitian di wilayah Kecamatan Pasir Sakti Desa Mekarsari Lampung Timur.

c. Lingkup Penelitian. Lingkup penelitian adalah sumber daya alam, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, lingkungan hidup, infrastruktur dan sosial.

BAB II

KERANGKA TEORI

Corporate social responsibility (CSR) meliputi kegiatan utama yaitu *legal behavior*, *ethical behavior*, dan *social responsibility behavior*, dan *sustainability*. Kotler dan Keller (2016) memberikan pejelasan terkait dengan dimensi kegiatan dalam CSR. Pertama, *legal behavior*. Perusahaan diharapkan memberikan jaminan agar para karyawan yang ada dalam perusahaan patuh dan taat pada peraturan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan. Kedua, *ethical behavior*. Perilaku beretika ini terkait dengan kepatuhan pada kode etik dan tidak melakukan kegiatan bisnis yang dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan sekitar. Ketiga, *social responsibility behavior.* Perusahaan menerapkan aspek tanggung jawab sosial yang memfokuskan pada pemangku kepentingan yang meliputi konsumen, pemerintah, pemasok, karyawan, lingkungan, masyarakat, dan lembaga sosial lainnya. Keempat, *sustainability***.** Perusahaan memiliki orientasi untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan kegiatan bisnis yang menunjang keberlangsungan jangka panjang.

Definisi CSR menurut *Draft International Standard ISO* 26000, *Guidance on Social Responsibility*, 2009, menyebutkan bahwa tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perlakuan yang transparan dan beretika yang memberikan kontribusi kepada pembangunan yang berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan dari masyarakat; memperhatikan harapan dari para pemangku kepentingan; sesuai dengan hukum

yang berlaku dan konsisten terhadap norma-norma perilaku internasional; dan terintegrasi dalam organisasi dan praktik.

Isi ISO 26000 mendukung perusahaan untuk menjalankan program CSR secara teknis sehingga bisa menciptakan kemampuan perusahaan dalam membentuk reputasi perusahaan yang positif, mampu menunjang daya saing dan tingkat kompetitif perusahaan, berusaha untuk mendukung program departemen sumber daya manusia dalam mempertahankan tenaga kerja yang unggul, pelanggan, mempertahankan moral karyawan, menguatkan komitmen dan produktivitas, menciptakan kepercayaan para investor atau penanam modal serta mampu menjaga hubungan baik dengan para elemen pemangku kepentingan lainnya yaitu pemerintah, media, pemasok, rekan, pelanggan dan masyarakat tempat perusahaan beroperasi.

Terkait dengan peraturan dari pemerintah, Program CSR juga diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang tertuang dalam Bab V terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pasal 74 sebagai berikut.

a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan CSR juga merupakan bagian kepatuhan pada penilaian Program (PROPER). PROPER ini merupakan salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendukung terciptanya penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Program PROPER ini ditujukan untuk mendorong perusahaan agar bersedia menaati peraturan perundang-undangan melalui pemberian insentif dan disinsentif reputasi, dan mendukung perusahaan yang sudah memiliki kinerja lingkungan yang baik untuk menerapkan produksi bersih. Pemilihan PROPER sendiri terdapat beberapa kriteria dalam penilaiannya.

BAB III

METODE PENELITIAN DAN PENGOLAHAN DATA

3.1. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang menggambarkan karakteristik dari seseorang, fenomena atau situasi. Penelitian ini menggunakan data pimer dan data sekunder, yaitu data orisinil hasil dari penelitian atau data mentah tanpa ada tambahan intepretasi dan terjemahan yang mewakili pihak resmi. Data ini dikumpulkan secara langsung dari lapangan, diperoleh dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara atau memberikan daftar pertanyaan. Data yang diambil berupa transkrip wawancara, hasil *focus group discussion*, rekaman video, gambar, foto, dan artikel. Adapun tahapan kegiatan pengambilan data sebagai berikut.

a. **Studi Pustaka.** Studi pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan data profil daerah yang menjadi lingkup penelitian dan demografi. Data lain yang dipelajari terkait dengan literatur penerapan CSR dan pelaksanaan *social mapping* sebagai acuan dalam pelaksanaan *social mapping*.
b. **Wawancara**. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam yaitu wawancara yang tetap menggunakan pedoman wawancara, namun penggunaannya tidak seketat wawancara terstruktur. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, sekaligus menjadi daftar *(checklist)*.

c. **Observasi.** Observasi secara langsung untuk melihat kejadian nyata dari hasil wawancara juga dibutuhkan, agar mendukung validasi data yang didapat. Observasi yang dilakukan memfokuskan pada kondisi nyata dari hasil wawancara di lapangan untuk mendapatkan gambaran yang utuh.

d. **Focus Group Discussion.** Studi ini menggunakan teknik wawancara dengan *focus group discussion*. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan informasi dari sejumlah interaksi individu di lapangan yang dilakukan pada waktu bersamaan dengan menggunakan serangkaian pertanyaan dan melakukan pengamatan secara langsung. Dalam *focus group* ini, peneliti memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden pada waktu yang bersamaan untuk menstimulasi diskusi dan mengerti maksud dan norma dari masalah yang sedang didiskusikan dan menggarisbawahi dari jawaban grup tersebut.

Tahapan selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dilakukan dengan sejumlah tahapan sebagai berikut.

a. Menelaah semua data yang tersedia dari berbagai sumber (wawancara, hasil pengamatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan lain sebagainya). Data yang didapatkan penulis adalah foto kegiatan, catatan lapangan dan dokumen perusahaan.

b. Mengadakan reduksi data atau memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.

c. Menyusun data reduksi dalam kategori pokok penelitian dalam *social mapping*.

d. Melakukan analisa dengan cara membandingkan data dengan teori yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian.

3.2. Rencana Kegiatan Social Mapping

Tabel 3.1. Kegiatan Social Mapping

No	Waktu Kegiatan	Materi Kegiatan	Metode	Luaran
1.	Februari 2018	Diskusi rencana kegiatan	Skype atau via telpon	Rencana untuk *social mapping*. Bentuk kerjasama Kesepakatan anggaran
2.	Maret 2018	Persiapan studi lapangan dan studi wilayah	Studi pustaka	Outline social mapping Daftar wawancara
		Studi lapangan 1	Wawancara, observasi	Hasil studi lapangan 1
3.	April 2018	Penulisan laporan	Analisis hasil lapangan	Laporan Akhir Presentasi Revisi

3.3. Outline Pelaporan

Outline pelaporan social mapping meliputi aspek-aspek berikut ini.

a. Bab 1 Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, tujuan, batasan penelitian, implikasi strategi.

b. Bab 2 Kajian Teori

c. Bab 3 Metode Penelitian yang terdiri atas unit analisis, sampel penelitian, sampling, koleksi data, analisis data.

d. Bab 4 Gambaran Umum untuk setiap wilayah atau desa yang dituju dan laporan awal.

e. Bab 5 Potensi dan Permasalahannya yang terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia termasuk kesehatan dan pendidikan, sumber daya ekonomi, sumber daya sosial, infrastruktur.

f. Bab 6 Isu-isu sentral yang terdiri atas kesehatan, pendidikan, lingkungan dan pemberdayaan ekonomi.
g. Bab 7 Program CSR PT Kinerja Maju Sejahtera yang terdiri atas peraturan, kebijakan, perencanaan, implementasi program, evaluasi program.
h. Bab 8 Analisis *stakeholder* yang terdiri atas profil *stakeholder*, aktor kunci.
i. Bab 9 Rekomendasi yang terdiri atas rencana strategis dan rencana operasional.

3.4. Tim Penyusun *Social Mapping*

Tim penyusun *social mapping* adalah Paramadina Management Advisory. Paramadina Management Advisory (PMA) didirikan untuk menjadi mitra masyarakat dalam menyelesaikan masalah manajerial. Dalam perkembangannya, Program Studi Manajemen merupakan program studi pertama yang mengawali adanya kemitraan dengan masyarakat, dalam hal ini organisasi bisnis dan non-profit untuk bersama-sama mencari solusi masalah dalam masyarakat khususnya bisnis dan permasalahan organisasi. Sejalan dengan peran Universitas dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk memberikan komitmen pelayanan pada masyarakat, PMA didirikan dengan semangat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan manajerial dan bisnis yang dihadapi oleh organisasi bisnis, non-profit dan pemerintah.

BAB IV

LAPORAN AWAL TERKAIT GAMBARAN UMUM

4.1. Gambar Awal Kabupaten Lampung TImur

Kegiatan *social mapping* dilakukan di **Kecamatan Pasir Sakti Desa Mekarsari Kabupaten Lampung Timur** ini merupakan daerah operasional dari Perusahaan PT Kinerja Maju Sejahtera yang bertanggung jawab terhadap penerapan CSR yang dilakukan di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Tujuan *social mapping* di daerah tersebut adalah mengacu pada Program CSR yang direncanakan oleh PT Kinerja Maju Sejahtera dalam optimalisasi sumber daya alam, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, lingkungan hidup, infrastruktur dan sosial. *Social mapping* ini menjadi awal dari pembuatan atau rencana strategis CSR PT Kinerja Maju Sejahtera.

Kabupaten Lampung Timur sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung memiliki wilayah kurang lebih 5.325,03 km2 dengan batas wilayah sebagai berikut.

a. Bagian Timur berbatasan dengan Laut Jawa, Provinsi Banten dan DKI Jakarta.
b. Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Metro Raya serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.
c. Bagian Selatan berbatasan dengan kecamatan Tanjung Bintang, Ketibung Pala dan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
d. Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Seputih Surabaya dan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 10 desember 2003 tentang ada perubahan status dan jumlah kecamatan menjadi 24 kecamatan; 227 desa definitif; 5 Kelurahan, dan 9 desa persiapan. Adapun 24 kecamatan- di Kabupaten Lampung Timur adalah 1) Sukadana; 2) Labuhan Maringgai; 3) Jabung; 4) Batang Hari; 5) Sekampung; 6) Pekalongan; 7) Way Jepara; 8) Purbolinggo; 9) Raman Utara; 10) Metro Kibang; 11) Marga Tiga; 12) Sekampung Udik; 13) Batang Hari Nuban; 14) Bumi Agung; 15) Bandar Sribawono; 16) Mataram Baru; 17) Melinting; 18) Gunung Pelindung; 19) Pasir Sakti; 20) Waway Karya; 21) Labuhan Ratu; 22) Braja Selebah; 23) Way Bungur dan 24) Marga Sekampung. Pusat pemerintahan di Kabupaten Lampung Timur terletak di Sukadana. Berikut luas masing-masing kecamatan di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 4.1. Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur

(Biro Pusat Statistik, Kabupaten Lampung Timur)

No.	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (ha)
1.	Sukadana	Sukadana	20	75.675,50
2.	Batanghari	Banar Joyo	17	14,887,95
3.	Sekampung	Sumber Gede	17	14,834,39
4.	Marga Tiga	Tanjung Harapan	13	25.072,94
5.	Sekampung Udik	Pugung Raharjo	15	33.912,45
6.	Jabung	Negara Batin	15	26.784,54
7.	Pasir Sakti	Mulyo Sari	8	19.393,83
8.	Waway Karya	Sumber Rejo	11	21.107,32
9.	Marga Sekampung	Peniangan	8	17.732,34
10	Labuhan Maringgai	Labuhan Maringgai	11	19.498,73
11	Mataram Baru	Mataram Baru	7	7.956,11
12	Bandar Sribhawono	Saribhawono	7	18.570,67
13	Melinting	Wana	6	13.929,74
14	Gunung Pelindung	Negeri Agung	5	7.825,25
15	Way Jepara	Braja Sakti	15	22.926,92
16	Braja Selebah	Braja Hajosari	7	24.760,68
17	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	11	48.551,22
18	Metro Kibang	Margototo	7	7.677,83
19	Bumi Agung	Donomulyo	8	7.317,47
20	Batanghari Nuban	Sukaraja Nuban	13	18.068,84
21	Pekalongan	Pekalongan	12	10.012,81
22	Raman Utara	Kota Raman	11	16.136,91

23	Purbolinggo	Taman Fajar	12	22.203,37
24	Way Bungur	Taman Subur	8	37.638,19

Kabupaten Lampung Timur memang memiliki potensi untuk maju karena ditunjang berdasarkan sejumlah kondisi secara umum. Ditinjau dari sisi pertanian, area Kabupaten Lampung Timur secara umum memiliki keunggulan sebagai berikut.

a. Sektor pertanian ini sangat dominan dengan komoditas unggulan antara lain padi, jagung, ubi kayu dan beberapa tanaman buah misalnya rambutan, durian, kelengkeng, dan pisang. Sektor ini memberikan kontribusi paling besar untuk mendukung perekonomian di Lampung Timur dan kemudian diikuti oleh sub-sektor perkebunan dan perikanan.
b. Kabupaten Lampung Timur memiliki irigasi teknis dengan sumber air yang berlimpah untuk mendukung sentra-sentra pertanian.
c. Terdapat lahan pertanian yang cukup luas untuk mendukung pengembangan komoditas lahan kering dan tanaman palawija.
d. Terdapat potensi Wisata Tirta di Kecamatan Pekalongan. Taman Wisata Tirta memiliki fasilitas kemah wisata, wisata alam, memancing dan olahraga.
e. Terdapat sentra penangkaran bibit buah-buahan, tanaman hias dan perkebunan.
f. Memiliki sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor utama terutama dari sektor minyak dan gas bumi. Lampung Timur memiliki kilang minyak lepas pantai di Pulau Segamat.

Daerah Kabupaten Lampung Timur secara umum memiliki peluang investasi yang bisa terus dikembangkan. Peluang investasi tersebut meliputi:

a. Penyediaan alat mesin pertanian pra dan pasca panen untuk komoditas padi dan jagung.

b. Penampungan hasil komoditas padi dan jagung.

c. Penyediaan modal kerja untuk sarana produksi pertanian.

d. Pengembangan tanaman holtikultura unggulan.

e. Pengembangan pisang Cavendish.

f. Pengembangan komoditas palawija unggulan.

Meskipun Kabupaten Lampung Timur memiliki keunggulan yang mendukung kemajuan daerah Lampung secara umum, Kabupaten Lampung Timur juga masih memiliki potensi untuk dikembangkan dan didukung lebih lanjut melalui adanya sejumlah Program CSR yang dilakukan oleh PT Kinerja Maju Sejahtera. Adapun wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui Program CSR dari PT Kinerja Maju Sejahtera adalah Kecamatan Pasir Mukti Desar Mekar Sari.

4.2. Kecamatan Pasir Mukti

Kecamatan Pasir Mukti merupakan salah satu kecamatan di Lampung Timur yang merupakan area pemekaran dengan luas daerah 19.393,83 ha. Secara administratif, Kecamatan Pasir Mukti memiliki 8 kelurahan yaitu Kedung Ringin (12km^2), Labuhan Ratu (14,40 km^2), Mekar Sari (9,88km^2), Mulyo Sari (17,18km^2), Pasir Sakti (18,81km^2), Purworejo (11,31km^2), Rejomulyo (17,26km^2) dan Sumur Kucing (17,60km^2). Kecamatan Pasir Mukti merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

a. Di sebelah Selatan, Kecamatan Pasir Mukti berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Selatan.

b. Di sebelah Barat, Kecamatan Pasir Mukti berbatasan langsung dengan Kecamatan Jabung.

c. Di sebelah Utara, Kecamatan Pasir Mukti berbatasan langsung dengan Kecamatan Gunung Pelindung Labuhan Maringgai.

d. Di sebelah Timur, Kecamatan Pasir Mukti berbatasan langsung dengan Laut Jawa.

Gambar 4.1. Pertemuan dengan Perangkat Desa
Sumber: Tim Peneliti

Gambar 4.2. Wawancara dengan Warga
Sumber: Tim Peneliti

Penduduk Kecamatan Pasir Sakti berdasarkan tahun 2016, sebanyak 37.117 jiwa. Komposisi ini terdiri atas 19.033 laki-laki dan 18.084 perempuan. Besaran rasio jenis kelamin pada tahun 2016 antara penduduk perempuan dan laki-laki sebesar 105. Terkait dengan kepadatan penduduk di delapan desa pada Kecamatan Pasir Mukti bersifat variatif. Tingkat kepadatan penduduk terbesar di Desa Mulyosari

sebesar 397 jiwa/km^2; sedangkan kepadatan penduduk terendah di Desa Sumur Kucing sebesar 234 jiwa/km^2.

4.3. Desa Mekar Sari

Desa Mekar Sari berada di Kecamatan Pasir Mukti, Kabupaten Lampung Timur. Aksesibilitas lokasi Desa Mekar Sari memberikan kemudahan bagi warga masyarakat. Jarak tempuh dari kantor Desa Mekar Sari ke Ibu Kota kecamatan Pasir Mukti sekitar 3 km dengan menggunakan kendaraan bermotor. Jarak tempuh dari Kecamatan Pasir Mukti ke Kota Kabupaten Lampung Timur dengan kendaraan bermotor sekitar 80 km. Jarak dari Kecamatan Pasir Mukti ke Puskemas terdekat atau Kantor Kepolisian adalah 3 km.

Terkait prasarana dan sarana transportasi, kondisi untuk mobilitas cenderung memiliki tingkat kualitas yang buruk. Kualitas jalan desa memiliki panjang jalan aspal yang tidak baik. Penambangan pasir yang terus menerus ini berdampak negatif terutama pada kecamatan dan sejumlah desa. Lahan penambangan pasar meninggalkan daerah yang tidak produktif karena tingkat keasaman air yang sangat tinggi, dengan demikian benih ikan yang ditebar di sini akan sulit tumbuh dan berkembang biak. Jalan rusak ini dikarenakan struktur pasir yang padat dan diperparah dengan lalu lintas padat setiap harinya dari kendaraan berbeban berat. Penambangan pasir yang makin meluas ini menjadi dilema bagi masyarakat kecamatan Pasir Sakti sendiri. Apabila penambangan pasir dihentikan, maka masyarakat akan kehilangan pekerjaan, namun apabila diteruskan, maka dampak lingkungan akan semakin memberatkan. Untuk moda angkutan umum, Desa Mekar Sari hanya memiliki 1 ojek sepeda motor, dan 3 mobil angkutan. Untuk mendukung

saluran komunikasi, ada 10 buah Menara Telepon Seluler (BTS) yang tersebar di Kecamatan Pasir Sakti termasuk di Mekar Sari.

Gambar 4.3. Foto Bersama dengan Perangkat Desa
Sumber: Tim Peneliti

Gambar 4.4. Wisata Air di Desa Mekar Sari
Sumber: Tim Peneliti

4.4. Demografi dan Sosial Budaya Masyarakat

Berdasarkan data demografi dari Proyeksi Kabupaten Lampung Timur 2010-2010 di Mekar Sari, jumlah laki-laki adalah 1367 orang sedangkan jumlah perempuan adalah 1326 orang. Terkait dengan kepadatan penduduk, persentase

penduduk sebesar 15,27% dan kepadatan penduduk sebesar 302 per km^2. Keberadaan fasilitas publik khususnya untuk pendidikan juga terbatas. Jumlah sekolah tingkat dasar sebanyak 1 buah; sekolah Raudhatul Athfal sebanyak 1 buah; sekolah Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 1 buah; Sekolah Menengah Pertama sebanyak 2 buah; sekolah Madrasah Tsanawiyah sebanyak 1 buah; sekolah Madrasah Alawiyah sebanyak 1 buah; sekolah Menengah Atas sebanyak 1 buah; sekolah vokasi 1 buah dan sekolah pesantren sebanyak 1 buah. Data pendidikan juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Mekar Sari biasa saja atau cenderung rendah. Jumlah siswa yang belajar sekolah tingkat dasar sebanyak 321 orang; sekolah Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 239 orang; Sekolah Menengah Pertama sebanyak 720 orang. Terkait dengan fasilitas kesehatan, jumlah fasilitas kesehatan di Desa Mekar Sari sangat terbatas. Fasilitas kesehatan yang ada hanyalah tempat praktik bidan sebanyak 1 buah. Dengan demikian, apabila ada yang sakit, maka masyarakat akan pergi ke kelurahan atau kota.

Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Sakti (2016), terkait dengan agama, mayoritas penduduk memeluk agama Islam sebanyak 2010 orang, kemudian diikuti oleh Hindu sebanyak 247 orang, Kristen sebanyak 128 orang, Katholik sebanyak 37 orang, dan Budha sebanyak 1 orang. Komposisi yang relatif beragama terkait dengan agama dan ras tidak menciptakan konflik antara penduduk yang mayoritas memeluk Islam dan non-Islam, konflik SARA, kasus perkelahian hingga menimbulkan korban jiwa atau kerugian material.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua RT 13 (Bapak Ghofur), Ketua RT 14 (Bapak Wahyono), Ketua RT 15 (Bapak Nuryadi), Ketua RT 21 (Bapak Wayan), untuk keberagaman suku penduduk desa sendiri merupakan transmigran ataupun pindahan dari daerah lain di Lampung. Meskipun memiliki keberagaman secara

suku, penduduk desa Mekarsari tergolong sangat guyub dan akrab serta menjunjung tinggi nilai gotong royong dan tolong menolong. Hal ini terbukti jika ada satu KK yang membangun rumah, maka semua orang akan memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuannya. Begitu pun dengan pembangunan tempat ibadah ataupun acara-acara keagamaan, masyarakat saling membantu meski berbeda keyakinan. Bentuk gotong royong dan tolong menolong yang lain juga terjadi saat akan perayaan HUT Desa Mekarsari pada bulan Mei dengan rangkaian acara yang akan dimulai satu bulan sebelumnya. Penduduk dengan senang hati memberikan sumbangan dan akan merayakan pesta ulang tahun desa dengan berbagai pagelaran seperti wayang kulit, campur sari, dangdut, aneka perlombaan, dan olah raga.

Agama Islam memang merupakan agama mayoritas, dengan demikian, tidak ada radikalisme. Permasalahan radikalisme sendiri tidak terlihat di wilayah Kecamatan Pasir Sakti. Hal ini tidak terlepas dari adanya Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang selalu melakukan komunikasi terhadap para tokoh-tokoh masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang baik ini, selalu akan ada diskusi bersama untuk menghadapi masalah-masalah yang nantinya bisa berpotensi mengarah pada konteks radikalisme. Selain itu, Babinkamtibmas juga terus menerus melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Dengan peran Babinkamtibmas ini, permasalahan yang sifatnya masih ada potensi dapat segera diredakan. Sama seperti halnya jika ada informasi-informasi yang sifanya *hoax*, maka peran Babinkamtibmas selalu melakukan koordinasi dengan pihak Polres dan pimpinan. Selain peran dari Babinkamtibmas, dari Polda Lampung sendiri memiliki tim *cyber* yang sifatnya akan melakukan penyisiran dan patroli media sosial. Dengan adanya tim *cyber* ini, gerak kepolisian

untuk bisa segera mengecek maupun mengusut informasi-informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan baik yang bersifat radikal maupun kebohongan dapat segera diatasi. Selain adanya tim tersebut, bentuk penyuluhan juga terus dilakukan salah satunya terkait dengan penggunaan internet sehat yang merupakan program langsung Polres di beberapa institusi pendidikan yang ada.

BAB V

ANALISIS POTENSI DESA

5.1. Potensi Desa Pasir Mukti

5.1.1. Potensi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perternakan, dan Perikanan

Secara umum, Kecamatan Pasir Mukti memiliki potensi pertanian tanaman bahan makanan, holtikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Kecamatan ini memiliki luas lahan pertanian sebesar 4904 hektar lahan pertanian sawah dan 1464 hektar lahan pertanian non-sawah. Produksi pada pada tahun 2016 mencapai 58.407,30 ton. Di samping itu, produksi tanaman palawija terutama jagung menghasilkan 2070 ton. Untuk produksi tanaman sayuran khususnya cabai, Kecamatan Pasir Mukti mampu memproduksi sebanyak 144 kuintal; semangka sebanyak 927 kuintal dan kelapa sebanyak 2700 kuintal. Untuk mendukung produksi ini, Kecamatan Pasir Mukti memiliki 9 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan 159 kelompok tani. Desa Mekar Sari hanya memiliki 1 Gapotan.

Menurut Kepala Cabang Dinas Pertanian Kecamatan Pasir Sakti, Desa Mekar Sari memiliki luas lahan terkait jenis penggunaan lahan yaitu pertanian sawah seluas 400 ha dan pertanian non-sawah seluas 198 ha serta non-pertanian seluas 387 ha. Luas lahan pertanian non-sawah diperuntukan pemanfaatan tegal, ladang, perkebunan dan kolam. Paling luas lahan pertanian non-sawah dimanfaatkan untuk perkebunan. Desa Mekar Sari memiliki lahan tanaman jagung terluas di Kecamatan Pasir Sakti sebesar 300 ha. Selain itu, lahan tanaman juga dimanfaatkan untuk kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar.

Untuk peternakan, Kecamatan Pasir Sakti memiliki ternak kambing dan sapi potong. Desa Sumur Kucing menjadi sentra ternak sapi potong dan untuk unggas, Desa Rejo Mulyo menjadi sentra ayam pedaging. Terkait dengan populasi ternak,

Desa Mekar Sari juga memproduksi sapi potong, kerbau, kambing, domba, ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, dan bebek.

Desa Mekar Sari juga memiliki industri pengolahan. Industri pengolahan di tingkat rumah tangga sebanyak 45 buah. Desa ini memiliki industri berbasis rumah tangga paling banyak di Kecamatan Pasir Sakti. Selain itu, desa juga memiliki industri dari kayu sebanyak 8 unit; 3 industri anyaman; 32 industri makanan dan minuman.

Menurut UU No.11 Tahun 1967, bahan galian bisa digolongkan menjadi 3 jenis yaitu Golongan A (bahan strategis), Golongan B (bahan vital) dan Golongan C (bahan tidak strategis dan tidak vital). Rincian sebagai berikut.

a. Bahan Golongan A adalah barang yang penting untuk mendukung pertahanan, keamanan, dan menopang keamanan dan perekonomian negara dan hanya dimiliki oleh pihak Pemerintah yaitu minyak, uranium dan plutonium.
b. Bahan Golongan B terkait dengan penjaminan hidup orang banyak yang meliputi emas, perak, besi dan tembaga.
c. Bahan Golongan C terkait dengan bahan yang tidak langsung memengaruhi hajat hidup orang banyak misalnya pasir, marmer, batu kapur.

Terkait dengan Bahan Galian Golongan C di Desa Mekar Sari adalah pasir.

Desa Mekar Sari juga memiliki sarana perdagangan yang terdiri atas 10 warung kelontong dan 7 kedai makan. Selain itu, ada 1 usaha jasa perorangan di bidang fotografi; dan 1 usaha rias pengantin. Desa Mekar Sari juga memiliki 1 usaha jasa penyewaan tarup; 2 peralatan pesta, 1 peralatan hiburan dan 2 peralatan dekorasi.

5. 2. Permasalahan Desa Mekar Sari

Ada sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh Desa Mekar Sari. Berdasarkan wawancara dengan Karang Taruna dan Gerakan Pemuda Anshor, ada permasalahan yang didapatkan sebagai berikut.

1. Tingkah Pendidikan yang Rendah

Pada umumnya, para warga yang termasuk dalam usia produktif dalam hal ini pemuda yang memiliki pendidikan SMP dan SMA dengan perbandingannya mencapai 30% dan 40%. Selain itu, masih diketahui usia produktif yang ada hanya lulusan SD. Jenis pekerjaan yang sering menjadi pilihan para pemudanya yaitu keluar dari desa maupun menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Situasi ini tidak terlepas dari pilihan pekerjaan yang sangat terbatas dan tidak terlalu menjanjikan ketika harus mengadu nasib di daerah sendiri. Jenis pekerjaan tersebut di antaranya yaitu menjadi petani dengan menggarap lahan orang lain, menjadi buruh, pekerjaan sebagai wiraswasta dengan skala kecil seperti berjualan sayur keliling maupun buka warung makan, membuka bengkel. Meskipun ada sebagian pemuda yang berprofesi sebagai guru, persentasenya masih sangat sedikit. Selain pilihan untuk bekerja, pada kelompok usia produktif ini tidak sedikit pula yang lebih memilih untuk menikah. Untuk warga yang termasuk dalam usia produktif ini pada dasarnya sebagian besar menjadi bagian dari anggota Karang Taruna.

2. Tingkat Pekerjaan yang Tidak Tetap

Untuk pekerjaan sebagai buruh pada dasarnya bukan pilihan pekerjaan yang menjanjikan karena sifatnya serabutan dan hanya mendapatkan pendapatan bersih Rp 60.000-Rp 70.000 dalam sehari meskipun sebagian besar sudah memiliki rumah sendiri secara permanen. Dalam hal ini, jika tidak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan, maka secara otomatis menjadi pengangguran. Untuk menjadi seorang

wiraswasta sendiri memiliki risiko kaitannya dengan pinjaman yang harus dikembalikan dalam upayanya menjalankan usahanya. Untuk pemasukan yang diperoleh ketika menjadi seorang wiraswasta dalam realitasnya tidak sedikit yang hanya mendapatkan hasil yang minimal sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman yang sudah diajukan sebelumnya**.**

Hal ini juga dikuatkan dengan informasi dari Gerakan Pemuda Anshor yang menyampaikan terkait dengan masalah pekerjaan. Warga masyarakat di Desa Mekarsari ini sangat beragam. Hal ini tidak terlepas dari banyak pendatang yang masuk dan menetap di desa ini yang mayoritas dari Jawa. Untuk jenis pekerjaan para warga desa Mekarsari menurut pengamatan anggota GP Ansor sendiri banyak yang melakukan perantauan. Hal ini terkait dengan minimnya pilihan pekerjaan yang ada di desa. Pilihan pekerjaan yang ada saat ini di Desa Mekarsari yaitu petani, buruh tani, buruh pasir dan warsa (pengolahan pasir). Untuk jenis pekerjaan wirausaha sendiri ada beberapa tetapi tidak sedikit yang mengalami kegagalan salah satu contohnya adalah minimarket yang diinisiasi oleh NU dan pada akhirnya berhenti beroperasi. Bentuk wirausaha lain yang juga dijalankan oleh para warga saat ini dan banyak dilakukan yaitu berupa menjual produk kecantikan Nasa yang pasokan barangnya didatangkan dari Jakarta.

Berdasarkan wawancara dengan Pihak Perangkat Pemerintahan diketahui bahwa Wilayah Kecamatan Pasir Sakti Desa Mekarsari memiliki jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 842 KK yaitu kurang lebih 20 ribu jiwa. Mayoritas jenis pekerjaan yang dimiliki oleh warga rata-rata yaitu buruh penambang pasir untuk perusahaan maupun mandiri. Selain sebagai buruh, petani juga merupakan jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh warga. Untuk pertanian sendiri saat ini masih tergantung pada cuaca sehingga memengaruhi musim tanam dan hasil panen. Untuk

jenis pekerjaan yang lain misalnya wirausaha belum menjadi pilihan mayoritas para warganya meskipun sudah ada pendampingan untuk pengembangan UKM salah satunya pengolahan kerupuk singkong.

3. Tambak Udang

Sebagian warga juga mencoba melakukan budidaya ikan dan udang panami dengan memanfaatkan bekas galian pasir. Namun hal tersebut juga tidak bisa dijalankan dengan baik karena ekosistem galian pasir tersebut tidak sesuai untuk pengembangan budidaya ikan dan udang panami. Saat ini warga beralih melakukan budidaya air tawar. Namun tetap saja belum bisa memberikan hasil yang maksimal sehingga tidak sedikit juga kurang menyerap tenaga kerja dalam proses budidaya tersebut.

4. Perilaku Negatif

Terdapat beberapa perilaku negatif yang dapat menjadi potensi merusak nilai positif yang dimiliki tersebut yaitu kebiasaan minum minuman keras hingga perilaku mengkonsumsi narkoba. Perilaku negatif tersebut tidak terlepas dari permasalahan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan sebagai seorang pengangguran. Keberadaan pemuda sebagai anggota Karang Taruna memiliki potensi untuk dapat berkembang lebih baik karena mendasarkan pada nilai-nilai positif yang dimiliki berupa mau bekerja keras, suka bekerjasama hingga menghindari konflik yang mungkin terjadi antar anggota.

5. Pemanfaatan Galian Pasir

Dalam perencanaan yang ingin dicapai oleh Karang Taruna sendiri diarahkan pada upaya pemanfaatan lahan bekas pertambangan galian pasir yang sudah tidak beroperasi. Letak pertambangan tersebut dirasa sangat strategis untuk dikelola menjadi lokasi wisata maupun pemanfaatan perikanan yang nantinya dapat

memberikan pemberdayaan yang baik dalam peningkatan perekonomian para anggota Karang Taruna maupun warga pada umumnya. Namun permasalahan yang masih dihadapi dalam perencanaan tersebut tidak terlepas dari kebutuhan biaya yang sangat besar untuk bisa mengubah lahan bekas tambang menjadi lokasi pariwisata maupun pemanfaatan perikanan. Selain itu, diperlukan izin dari pemilik lokasi pertambangan pasir agar bersedia tanahnya dikelola untuk pemanfaatan yang berbeda.

6. Sanitasi

Permasalahan lain yang juga penting di desa Mekarsari terkait dengan sanitasi. Hal ini merupakan masalah perilaku kebersihan yang terkait dengan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK). Secara fisik keberadaan MCK warga Desa Mekarsari mayoritas mencapai 60% tidak memenuhi standar baik. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan para warga sendiri secara ekonomi untuk membangun MCK sesuai dengan standar yang ada. Keberadaan MCK yang kurang baik ini pada dasarnya sudah pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Namun jenis bantuan yang diberikan berupa kloset dianggap masih kurang. Bantuan berupa kloset hanya satu dari kebutuhan yang lainnya untuk bisa membangun MCK yang baik. Para warga sendiri masih memerlukan bantuan berupa semen, pasir, hingga tenaga untuk membangun MCK yang layak.

7. Banjir

Banjir juga menjadi potensi permasalahan yang ada. Potensi bencana yang bisa terjadi di wilayah Kecamatan Pasir Sakti tersebut adalah banjir kiriman maupun longsor akibat bekas penambangan pasir yang tidak dikelola dengan baik oleh perusahaan yang sebelumnya bertanggung jawab pada pertambangan. Selain itu,

masih terdapat pelanggaran terkait kedalaman penggalian yang sudah diatur oleh Peraturan Desa yaitu hanya 4 meter.

8. Masalah Perusahaan Tambang

Keberadaan perusahaan tambang di wilayah kecamatan Pasir Sakti pada dasarnya menimbulkan pro dan kontra. Selain dapat memberikan efek positif dalam penyerapan tenaga kerja, tidak sedikit juga telah terjadi permasalahan antara warga dengan perusahaan. Permasalahan terkait dengan bahan galian memiliki sejumlah dampak yaitu:

a. *Permasalahan infrastruktur.* Permasalahan yang sudah terjadi saat ini di antaranya berkaitan dengan permasalahan infrastruktur jalan dan regulasi dalam penambangan. Kondisi infrastruktur jalan khususnya termasuk dalam kategori kurang baik. Hal ini tidak terlepas dari efek penggunaan alat transportasi berat untuk penambangan sehingga merusak jalan.

b. *Keselamatan warga.* Selain permasala han tersebut, keberadaan perusahaan tambang memberikan permasalahan lain khususnya keselamatan bagi warga sekitar. Hal ini terkait dengan kelalaian perusahaan untuk bisa mengelola wilayah pertambangan setelah proses penambangan selesai. Tidak sedikit menurut warga, lokasi penambangan telah memakan korban akibat tidak adanya pemberian tanda yang jelas terkait dengan bahaya yang ada. Lubang penggalian hasil tambang ditinggalkan saja tanpa ada penanganan dan pengamanan yang baik sehingga dapat memunculkan korban jiwa di antaranya anak yang tenggelam karena bermain di area lubang tersebut. Hal ini diperkuat melalui wawancara dengan Ketua RT 13 (Bapak Ghofur), Ketua RT 14 (Bapak Wahyono), Ketua RT 15 (Bapak Nuryadi), Ketua RT 21 (Bapak Wayan) mengenai keberadaan perusahaan pertambangan pada dasarnya

tidak selalu memberikan hal yang positif bagi wilayah sekitar. Permasalahan yang terjadi saat ini di antaranya kondisi yang memprihatinkan terutama akibat jalan yang rusak karena dilewati oleh truk-truk pasir yang mengangkut berton-ton pasir. Selain itu, telah banyak terjadi korban anak-anak yang terpeleset akibat bekas galian pasir yang ditinggal begitu saja oleh perusahaan. Untuk permasalahan regulasi sendiri, ditemui beberapa kasus yaitu perizinan yang sudah tidak berlaku dalam melakukan penambangan akan tetapi perusahaan masih bisa beroperasi. Situasi tersebut pada dasarnya menimbulkan konflik antara warga dan perusahaan. Hal ini juga tidak terlepas operasional tambang seringkali membuat suara bising sehingga warga sudah tidak merasa nyaman. Selain hal tersebut, keberadaan konsep Minapolitan yang diusung oleh pemerintah daerah tidak segera dilaksanakan oleh perusahaan. Konsep Minapolitan mengarahkan pada upaya pemanfaatan wilayah bekas galian penambangan untuk kebermanfaatan masyarakat. Pihak perusahaan dalam hal ini lebih bersikeras pada pilihan untuk melakukan eksplorasi tambahan di lahan-lahan tersebut dan keinginan masyarakat terkait dengan limbah pertambangan (pasir) untuk tidak dibawa keluar wilayah penggalian agar bisa dimanfaatkan warga tidak dapat dipenuhi. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan perusahaan tambang serta masyarakat. Badan Pembangunan Desa beserta pemerintahan daerah menjadi mediator mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

c. *Penambangan di luar izin*. Berdasarkan informasi dari Perangkat Pemerintahan, permasalahan yang berkaitan dengan penambangan ini pada dasarnya tidak hanya terkait dengan keberadaan penambangan yang dilakukan oleh perusahaan. Penambangan yang dilakukan secara mandiri

oleh warga pada dasarnya juga memberikan permasalahan tersendiri. Setelah masyarakat mengetahui efek ekonomi yang diperoleh dari menjual hasil tambang, tidak sedikit masyarakat melakukan penambangan di wilayah-wilayah yang tidak ada perizinan maupaun lahan pribadi. Hasil penambangan mandiri yang dilakukan oleh warga nantinya akan dikirimkan kepada para pengepul untuk dilakukan penjualan di luar wilayah Pasir Sakti. Keberadaan perilaku penambangan mandiri dan liar ini pada dasarnya dapat memberikan ancaman yang tidak hanya kepada lingkungan tetapi keselamatan para warga itu sendiri. Meskipun sudah diterbitkan Peraturan Desa yang mengatur mengenai penambangan tersebut, masih banyak yang melakukan pelanggaran. Dari pihak kepolisian sendiri mengalami kewalahan dan kadang tidak mengetahui penambangan liar yang dilakukan oleh warga. Hasil tambang yang menjadi incaran para warga untuk menambah tingkat perekonomiannya yaitu berupa pasir. Wawancara Kepala Dusun juga menguatkan permasalahan yang dihadapi oleh warga terkait dengan penambangan yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Kepala Dusun yaitu kepatuhan perusahaan penggalian pasir terhadap ketentuan peraturan penggalian yang sudah ditetapkan oleh pemerintah lokal. Bentuk ketentuan peraturan yang ada salah satu contohnya adalah kepatuhan perusahaan terhadap kedalaman dan luas lubang galian. Hal yang lain juga kepatuhan perusahaan terhadap jarak aman penggalian 100 meter dengan pemukiman warga. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan penggalian tersebut karena akan berdampak baik kepada jangka panjang terhadap warga sekitar yang selama ini terkena dampak ketidakpatuhan perusahaan teradap peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya tidak sedikit patok yang dijadikan

batasan dalam penggalian hilang sehingga wilayah penggalian bisa mendekati pemukiman. Permasalahan dengan ketidakpatuhan perusahaan ini pada dasarnya memberikan beberapa dampak yaitu seperti lubang galian yang ditinggal tidak terurus sehingga bisa membahayakan para warga. Selain itu lubang galian tersebut bisa ditinggali hewan liar yang memakan ternak warga misalnya ayam.

d. *Tingkat pencemaran yang tinggi*. Permasalahan mengenai dampak yang lain yaitu sampai dengan pencemaran air bersih yang tidak bisa dikonsumsi akibat tingkat asam terlalu tinggi sebagai hasil pencemaran dari proses penambangan di dalam tanah yang memberikan pencemaran terhadap air tanah.

e. *Memengaruhi proses irigasi*. Keberadaan penggalian yang dilakukan oleh perusahaan juga pada dasarnya memengaruhi proses irigasi untuk pertanian yang ada di sekitar wilayah penambangan.

f. *Memiliki dampak pada perikanan*. Untuk budidaya perikanan sendiri beberapa warga pada dasarnya sudah memiliki kolam masing-masing ditempat tinggalnya. Beberapa warga juga memanfaatkan rawa-rawa yang ada di wilayah desa untuk dijadikan budidaya ikan. Untuk pemanfaatan yang lain pada dasarnya bekas galian pertambangan bisa saja dimanfaatkan untuk tempat budidaya perikanan. Akan tetapi perlu adanya penanganannya yang berbeda mengingat ekosistem yang ada merupakan bekas galian penambangan dengan tingkat keasaman airnya sangat tinggi.

9. Kriminal

Untuk tingkat kriminalitas yang terjadi di wilayah Kecamatan Pasir Sakti sendiri masih tergolong umum dalam artian tidak terlalu tinggi. Kriminalitas yang terjadi seringkali mengarah pada bentuk pencurian sepeda motor dan pencurian sanyo yang dilakukan oleh orang dari luar wilayah Kecamatan Pasir Sakti. Untuk pencurian sepeda motor sendiri tidak sedikit akibat kelengahan warga yang meninggalkan kunci kendaraan. Selain pencurian, permasalahan narkoba juga menjadi salah satu yang masih terjadi di wilayah Kecamatan Pasir Sakti sebagai wilayah perlintasan. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi salah satu bentuk kriminalitas yang pernah dihadapi oleh para perangkat desa maupun hukum di wilayah Kecamatan Pasir Sakti.

Untuk kondisi kriminalitas sendiri di Desa Mekarsari tidak sedikit terjadi tindak kriminal perampasan sepeda motor dan penjambretan terhadap anak-anak sepulang sekolah. Tindak kriminalitas seperti halnya tersebut seringkali melibatkan pelaku dari wilayah yang jauh di luar Desa Mekarsari. Tindak kriminalitas lain yang perlu diperhatikan juga saat ini berkaitan dengan keberadaan pemalakan di wilayah obyek wisata.

Sebagai upaya mengatasi kriminalitas di wilayah ini, selain adanya bentuk patroli aktif dari pihak kepolisian, terdapat program Rembug Pekon (rembug desa) yang merupakan arahan dari Kapolda. Dalam rembug ini, beberapa masalah kriminalitas misalnya KDRT diarahkan pada jalur mediasi dan musyawarah agar bisa dicarikan solusinya tanpa perlu diarahkan pada ranah hukum. Untuk kejahatan pencurian dengan nominal Rp 2000.000,00 di atas, harus dilanjutkan pada tahapan penyidikan pada ranah Resese Kriminal, ranah pidana.

Selain masalah kriminalitas, ada juga tingkat konflik sosial yang terjadi di wilayah Kecamatan Pasir Sakti dikarenakan adanya permasalahan kepemilikan lahan tanah. Hal ini tidak jarang menjadikan munculnya konflik sosial dan sangat erat kaitannya dengan permasalahan ekonomi. Meskipun timbul konflik sosial tersebut, permasalahan dapat bisa diselesaikan melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).

10. Produksi Pertanian

Produksi pertanian di Desa Mekar Sari memiliki sejumlah permasalahan yang meliputi:

a. *Masalah Produk Kedelai*. Desa Mekar Sari memiliki potensi ekonomi khususnya untuk produksi tempe. Untuk produksi tempe sendiri pada dasarnya sudah terdapat beberapa UKM yang melakukan produksi. Namun permasalahan yang dihadapi saat ini terkait dengan pasokan bahan dasar produksi yaitu kedelai yang dirasa cukup mahal. Kedelai yang dipakai saat ini kedelai impor. Untuk kedelai lokal sendiri dinilai kurang layak untuk bisa menjadi bahan dasar produksi tempe yang bisa menghasilkan tempe dengan kualitas baik tampilan maupun rasa yang baik. Permasalahan terkait kedelai lokal ini para petani pernah mengajukan bantuan kepada Dinas Pertanian, namun bibit kedelai tidak bisa ditanam karena saat itu merupakan musim penghujan. Dengan situasi tersebut permasalahan mendasar yang perlu dilihat terkait dengan modal untuk bisa memenuhi produksi yang besar. Selain keberadaan modal, salah satu upaya yang bisa diarahkan pada pencarian bahan dasar kedelai lokal yang lebih baik dan bisa dijadikan sebagai bahan

dasar untuk produksi tempe yang berkualitas disertai dengan pendampingan pertanian yang tepat dalam bercocok tanam kedelai.

b. *Potensi pengembangan produksi sayur mayur*. Hal ini terlihat dengan adanya pengembangan kelompok wanita mandiri yang sudah diberikan pendampingan oleh Dinas Pertanian sendiri. Penanaman sayuran oleh kelompok wanita mandiri ini menjadi salah satu program pemberdayaan yang bisa meningkatkan perekonomian rumah tangga melalui para istri, namun perlu pada pendampingan lanjut lagi agar mampu mengembangkan pengelolaan dan distribusi lebih baik.

11. Pembinaan Pemuda

Keberadaan Karang Taruna menjadi salah satu organisasi yang mengarahkan pada pemberdayaan pemuda di wilayah ini. Organisasi Karang Taruna hingga saat ini memiliki anggota yang berjumlah kurang lebih 100 orang. Keberadaan Karang Taruna ini pada dasarnya juga mendapai beberapa masalah.

a. Partisipasi kurang aktif. Terkait dengan tidak sedikitnya anggota Karang Taruna tidak aktif secara maksimal. Anggota yang mau secara aktif terlibat dalam kegiatan Karang Taruna bisa dikatakan hanya orang-orang tertentu saja. Untuk anggota Karang Taruna yang perempuan sendiri sebagian besar telah memiliki suami. Hal tersebut juga memberikan permasalahan tersendiri terkait dengan keaktifan dalam organisasi.

b. *Lebih aktif pada satu bidang yaitu olahraga*. Kegiatan Karang Taruna untuk saat ini lebih berfokus kepada kegiatan olahraga (volley, sepakbola, bulutangkis) dan kesenian.

c. *Keterbatasan dana*. Untuk kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat sendiri pada dasarnya sudah pernah dilakukan yaitu berupa kegiatan membantu petani muda untuk memperoleh pasokan pupuk dan bibit yang lebih murah. Kegiatan ini sendiri lebih menyasar pada petani yang menjadi bagian dari anggota Karang Taruna. Kegiatan pendampingan ini tidak dapat berjalan secara terus menerus dikarenakan keberadaan dana operasional yang sudah tidak mampu mendukung dengan baik. Ketidakmampuan dalam pendanaan ini salah satu permasalahannya tidak terlepas dari sumber pendanaan itu sendiri yang hanya berasal dari para anggota Karang Taruna. Dengan jenis pekerjaan yang mayoritas memiliki penghasilan rendah dirasa sulit menjaga maupun mengharapkan keberlanjutan dukungan pendanaan dari anggota.

d. *Kurangnya prasarana*. Permasalahan lain yang dihadapi yaitu untuk organisasi Karang Taruna sendiri pada dasarnya sudah memiliki gedung yang dijadikan sebagai pusat kegiatan, akan tetapi gedung tersebut belum secara penuh diserah terimakan kepada Karang Taruna. Kondisi ini mengakibatkan gedung yang diperuntukkan untuk kegiatan pemuda Karang Taruna menjadi terbengkalai dan mulai rusak. Dalam setahun ini proses penyerahan gedung dari pihak pembangun ke pihak desa yang nantinya harus diserahkan kepada Karang Taruna kurang diketahui kejelasannya. Keberadaan pihak desa yang dirasa tidak terlalu melibatkan Karang Taruna dalam pengambilan keputusan untuk kegiatan maupun upaya peningkatan kesejahteraan yang sifatnya menyasar warga desa sendiri menjadi sebuah permasalahan yang mengganjal keberadaan eksistensi Karang Taruna agar berperan lebih baik sebagai organisasi pemuda.

BAB VI

ISU SENTRAL

Berdasarkan kunjungan wawancara Maret 2018, ada sejumlah pertimbangan untuk memilih isu-isu penting Desa Mekar Sari. Dari sejumlah pembahasan mengenai potensi dan permasalahan, hasil observasi dan wawancara di lapangan, banyak permasalahan yang perlu diselesaikan. Dengan demikian, dari sejumlah permasalahan yang bisa diselesaikan dari Desa Mekar Sari, tidak semua permasalahan dijadikan prioritas untuk diselesaikan. Hal ini mempertimbangkan yaitu permasalahan yang bersifat kompleks yang melibatkan semua sektor yang ada sehingga memiliki dampak lebih luas untuk segera diselesaikan dan merupakan potensi yang dimiliki oleh individu bukan kelompok, namun memberikan implikasi luas pada kehidupan masyarakat pada umumnya. Selain permasalahan yang ada, potensi di Desa Mekar Sari memiliki kemungkinan untuk bisa dikembangkan lebih lanjut terutama untuk hasil pertanian, perkebunan dan juga perikanan agar mendukung peningkatan kehidupan dan perekonomian masyarakat secara umum.

6.1. Perbaikan Infrastruktur

Permasalahan mengenai transportasi angkut hasil tambang juga selama ini memberikan dampak yang buruk baik bagi infrastruktur jalan maupun kebisingan para warga. Perusahaan tidak dapat bergerak dengan cepat untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat menjadi lintasan hilir mudik truk pengangkut. Keberadaan truk pengangkut hasil tambang juga terkadang melewati jalan desa yang sebenarnya bukan merupakan jalur pengangkutan yang sudah diatur. Kondisi kerusakan infrastruktur jalan hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang dianggap merugikan masyarakat di wilayah kecamatan Pasir Sakti Desa Mekarsari. Pihak perusahaan sebagai pemilik alat transportasi dinilai lambat melakukan perbaikan

jalan sehingga tidak sedikit perbaikan dilakukan oleh warga secara mandiri. Situasi tersebut menjadikan masyarakat menolak akan keberadaan penambangan yang dirasa hanya memberikan kerugian bagi masyarakat khususnya pada infrastruktur jalan. Ketua RT menganggap perlu, jika memang ada perusahaan tambang pasir yang akan beroperasi di daerah mereka, maka perusahaan membangun jalan sendiri yang terpisah dengan jalan perkampungan penduduk. Hal ini diharapkan dapat mengurangi polusi serta tidak mengganggu aktivitas penduduk sekitar.

6.2. Revitalisasi Lahan Galian

Keberadaan penambangan juga menjadikan tanah longsor akibat pasir dari dalam tanah yang disedot sehingga meninggalkan lubang di dalam tanah. Permasalahan lain yang mulai dikeluhkan oleh warga yaitu kondisi tanah di wilayah desa Mekarsari yang dirasa sudah tidak cocok untuk pertanian karena keberadaan tanahnya yang mengandung pasir sehingga pertanian dianggap kurang bisa diandalkan sebagai mata pencaharian utama yang bisa meningkatkan perekonomian. Permasalahan lain terkait dengan pencemaran air bersih yang memiliki kadar asam yang terlalu tinggi sehingga tidak bisa dikonsumsi. Untuk mengurangi kadar asam, perlu dilakukan revitalisasi lahan galian agar bisa difungsikan untuk mendapatkan nilai tambah Desa Mekar Sari.

Proses penggalian juga menyebabkan masalah resapan air. Air tanah yang sekarang lebih sulit untuk ditemukan akibat peresapan air menjadi lebih dalam. Hal ini juga dikarenakan lapisan tanah (pasir) yang sebelumnya ada, sekarang sudah dikeruk. Sebelum ada penambangan, air tanah dapat diperoleh hanya dengan melakukan penggalian hingga 3 meter. Saat ini, sudah sangat sulit untuk mendapatkan air tanah dengan kedalaman tersebut sehingga saat musim kemarau

keberadaan air cukup sulit didapatkan. Situasi ini menyebabkan perlu adanya perbaikan proses irigasi yang tidak hanya mengandalkan air tanah.

Untuk pemanfaatan wilayah galian penambangan sebagai tempat budidaya perikanan pada dasarnya juga menjadi salah satu keinginan warga desa. Dengan memanfaatkan wilayah bekas penambangan diharapkan dapat meningkatkan produksi budidaya perikanan sehingga dapat menaikkan perekonomian masyarakat. Untuk bantuan bibit ikan sendiri dari dinas terkait pernah diberikan meskipun hanya sekali dan sudah tidak ada lagi bantuan bibit yang lain.

Secara umum, menurut Ketua RT 13 (Bapak Ghofur), Ketua RT 14 (Bapak Wahyono), Ketua RT 15 (Bapak Nuryadi), Ketua RT 21 (Bapak Wayan), permasalahan terkait dengan penggalian, lebih memfokuskan pada dampak tingkat perekonomian warga. Hal ini bisa terlihat dengan jenis pekerjaan yang harus mereka lakukan saat ini. Para warga seringkali berganti pekerjaan kasar satu ke pekerjaan kasar lainnya. Dengan adanya penggalian pasir di wilayah mereka, para pemuda dan kepala keluarga mempunyai pekerjaan sementara sebagai buruh tambang. Perusahaan biasanya membiarkan penduduk melakukan kegiatan penjemuran dan pengayakan pasir di halaman depan rumah mereka, jadi bisa terlihat di setiap rumah penduduk terdapat gundukan-gundukan pasir yang akan diolah. Keberadaan pekerjaan yang dilakukan oleh warga di pertambangan ini pada dasarnya bisa memberikan dampak pada perekonomian sehingga warga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Meskipun demikian, tidak sedikit pula para warga sendiri sudah merasa bahwa pertambangan sendiri lebih banyak memberikan pengalaman serta dampak yang buruk terhadap lingkungan sehingga memengaruhi ketenteraman serta kesejahteraan warga di sisi yang lain. Para warga melihat dibandingkan adanya perusahaan pertambangan, mereka lebih memilih untuk

adanya industri yang berupa pabrik, peternakan maupun wisata. Keberadaan industri-industri tersebut menurut para warga lebih dibutuhkan dan bermanfaat serta tidak terlalu membawa dampak yang buruk dibandingkan pertambangan.

Dengan kondisi tersebut, terdapat beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi bagi warga yang termasuk dalam usia produktif khususnya yang menjadi anggota Karang Taruna. Kebutuhan yang paling utama dalam hal ini berupa kebutuhan pelatihan kerja agar mampu meningkatkan pengetahuan serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh desa agar ke depan terdapat peluang pekerjaan yang baru selain dari pilihan pekerjaan yang ada saat ini. Keberadaan sumber daya yang dimiliki desa ini berupa pemanfaatan lahan-lahan kosong maupun lahan yang terlantar yang sebelumnya merupakan bekas pertambangan galian pasir. Keberadaan sumber daya lahan ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk pembuatan objek pariwisata maupun bentuk pemanfaatan peternakan ikan lele maupun bentuk pemanfaatan lainnya dengan mengarahkan pada pertanian.

Potensi ekonomi yang bisa diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terkait dengan keberadaan bekas pertambangan yaitu pariwisata serta budidaya perikanan. Keberdaan pariwisata dapat mengarahkan pada penyerapan tenaga kerja yang maksimal baik sebagai pengelola maupun berwirausaha dalam pembuatan oleh-oleh di tempat pariwitasa tersebut. Keberadaan budidaya ikan juga memiliki prospek yang baik jika mampu dikembangkan dengan metode yang tepat mengingat ekosistem bekas pertambangan tidak akan sama dengan kondisi di awal. Potensi ekonomi tersebut pada dasarnya sejalan dengan keinginan masyarakat yang ingin memaksimalkan lahan bekas pertambangan sebagai salah satu cara meningkatkan perekonomian.

Keberadaan perusahaan tambang di wilayah kecamatan Pasir Sakti bagi masyarakat selain menyerap tenaga kerja bekerja di perusahaan seharusnya juga dapat memberikan transfer kemampuan bagi warganya untuk melakukan pertambangan mandiri meskipun hanya secara tradisional. Dengan adanya transfer kemampuan tersebut diharapkan warga dapat mengelola potensi tambang yang ada di wilayah kecamatan Pasir Sakti dari produksi hingga melakukan pemasokan ke daerah yang dibutuhkan.

Terkait dengan potensi perikanan, berdasarkan informasi dari Ketua Kelompok Kerja Industri Maritim dan Peternakan, Provinsi Lampung menjadi target lumbung udang nasional. Hal ini bertujuan untuk menindaklanjuti kebijakan Presiden untuk mendukung penerimaan devisa negara melalui peningkatan ekspor nasional melalui komoditas khusus udang. Provinsi Lampung sudah lama memiliki sentra produksi udang melalui perusahaan Dipasena dan Central Proteina Prima yang beroperasi di Tulangbawang, Lampung Timur. Di sepanjang pesisir Lampung Timur, terdapat budidaya tambak udang yang nantinya bisa memberikan kontribusi besar terhadap pasokan udang nasional. Dengan demikian, dibutuhkan revitalisasi daerah pertambangan agar bisa dioptimalkan untuk dimanfaatkan sebagai tambak udang.

Selain potensi pertanian dan perikanan dalam meningkatkan perekonomian warga, keberadaan potensi pariwisata juga terdapat di wilayah desa Mekarsari. Wilayah bekas galian pasir yang sudah ada saat ini beberapa di antaranya dimanfaatkan sebagai tempat wisata yang salah satunya bernama Danau Bambu. Meskipun tempat wisata tersebut sudah beroperasi sekian lama, tempat wisata ini belum bisa memberikan hasil yang maksimal bagi warga sendiri. Hal ini terlihat dari frekuensi pengunjung yang hanya ramai di hari-hari tertentu. Hal ini diperlukan adanya upaya lain agar tempat wisata tersebut dapat menarik wisatawan tidak hanya

lokal dan meningkatkan frekuensi pengunjung di setiap harinya sehingga bisa menjadi ikon pariwisata yang kuat. Dengan kondisi yang ideal tersebut, diharapkan keberadaan tempat wisata ini dapat menyerap tenaga kerja yang maksimal serta meningkatkan perekonomian bagi masyarakat.

Dengan adanya revitalisasi galian pasir, akan mengurangi tingkat kriminalitas di Desa Mekar Sari. Hal ini tidak terlepas dari wilayah Kecamatan Pasir Sakti yang merupakan sebuah perlintasan. Kriminalitas terjadi antara lain pencurian sepeda motor, penjambretan, dan pemalakan. Pemalakan yang masih sering terjadi di wilayah objek wisata memberikan gangguan serta membuat tidak nyaman para pengunjung. Jika situasi ini tidak segera ditindaklanjuti dengan tepat, maka akan sangat mungkin malah merugikan warga di sekitar objek wisata akibat menurunnya para pengunjung karena pemalakan tersebut.

6.3. Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan

Potensi pemberdayaan perekonomian pada warga di masyarakat Pasir Sakti mengarahkan pada beberapa hal yang harus diperhatikan agar dapat mencapai hasil yang maksimal yaitu pertama kesediaan bibit yang berkualitas agar mencapai hasil produksi yang baik. Kedua, pengetahuan dan kemampuan dalam produksi yang efektif dan efisien baik untuk potensi perkebunan, pertanian, serta peternakan dengan situasi terkait dengan wilayah penambangan yang pastinya memberikan dampak pada kondisi lahan. Ketiga, pengolahan hasil produksi yang dapat diterima dengan baik oleh pasar dan keempat, berkaitan dengan pemasaran itu sendiri yang terlingkupi dalam pengepakan serta cara pemasaran yang tepat.

Desa Mekar Sari memiliki lahan tanaman jagung terluas di Kecamatan Pasir Sakti sebesar 300 ha. Selain tanaman jagung, Desa Mekar Sari memiliki lahan

tanaman juga dimanfaatkan untuk kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Sumber daya ini bisa dimanfaatkan dengan pengolahan lebih lanjut. Untuk pemberdayaan kelapa, hal ini telah dicoba oleh masyarakat yang lokal yang berasal dari Bali yang menanam pohon kelapa di tiap rumah. Walaupun tujuan nya adalah untuk keperluan ibadah, ada dampak potensial yang dapat dikembangkan, mengingat sudah terbentuk pasar yang baik untuk industri kelapa (dengan ada nya buruh kelapa dan pengepul kelapa). Selain disediakan pemberdayaan pohon kelapa, ada baiknya juga diberikan pelatihan kewirausahaan sehingga produk kelapa yang sudah dihasilkan dapat diberdayakan sehingga dapat memberikan nilai ekonomis yang lebih besar.

Potensi lain yang bisa dioptimalkan adalah sayur mayur yang membutuhkan pengelolaan lebih lanjut. Dengan pengelolaan yang baik, produksi sayuran dapat menjadi konsumsi pribadi maupun dijual ke pasaran. Kondisi tersebut secara otomatis akan memberikan dampak perekonomian baik berupa penghematan maupun pemasukan bagi rumah tangga. Permasalahan yang masih terjadi terkait dengan pemberdayaan kelompok wanita mandiri ini tidak terlepas dari modal yang masih terbatas untuk membeli bibit tanaman. Program bantuan yang sedianya akan diberikan oleh Dinas Pertanian kadang kala tidak cair, dan bantuan bibit, pupuk maupun obat tanaman yang diberikan memiliki kualitas yang kurang baik. Dengan kondisi tersebut, tidak sedikit warga lebih memilih untuk membeli bibit sendiri yang lebih berkualitas.

Terkait dengan potensi peternakan, untuk potensi peternakan bebek sendiri masyarakat sudah cukup banyak yang menjadi peternak bebek. Untuk peternakan bebek ini sendiri lebih banyak dimanfaatkan untuk produksi telur bebek dibandingkan konsumsi daging bebek. Kemudahan dalam beternak bebek dirasakan oleh warga karena perawatannya yang dirasa lebih mudah dan murah.

6.4. Penguatan Karang Taruna

Keberadaan Karang Taruna bertujuan untuk menguatkan pemberdayaan pemuda di wilayah ini. Permasalahan yang dihadapi oleh Karang Taruna bisa diberikan pendampingan agar memberikan solusi bagi kehidupan masyarakat di Desa Mekar Sari dengan lebih baik. Partisipasi yang kurang aktif dari warga masyarakat bisa diberdayakan

a. Partisipasi kurang aktif. Terkait dengan tidak sedikitnya anggota Karang Taruna tidak aktif secara maksimal. Anggota yang mau secara aktif terlibat dalam kegiatan Karang Taruna bisa dikatakan hanya orang-orang tertentu saja. Untuk anggota Karang Taruna yang perempuan sendiri sebagian besar telah memiliki suami. Hal tersebut juga memberikan permasalahan tersendiri terkait dengan keaktifan dalam organisasi.

b. Lebih aktif pada satu bidang yaitu olahraga. kegiatan Karang Taruna untuk saat ini lebih berfokus kepada kegiatan olahraga (volley, sepakbola, bulutangkis) dan kesenian.

c. Keterbatasan dana. Untuk kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat sendiri pada dasarnya sudah pernah dilakukan yaitu berupa kegiatan membantu petani muda untuk memperoleh pasokan pupuk dan bibit yang lebih murah. Kegiatan ini sendiri lebih menyasar pada petani mudah yang menjadi bagian dari anggota Karang Taruna. Kegiatan pendampingan ini tidak dapat berjalan secara terus menerus dikarenakan keberadaan dana operasional yang sudah tidak mampu mendukung dengan baik. Ketidakmampuan dalam pendanaan ini salah satu permasalahannya tidak terlepas dari sumber pendanaan itu sendiri yang hanya berasal dari para anggota Karang Taruna. Dengan jenis pekerjaan yang mayoritas memiliki

penghasilan rendah dirasa sulit menjaga maupun mengharapkan keberlanjutan dukungan pendanaan dari anggota.

d. Kurangnya prasarana. Permasalahan lain yang dihadapi yaitu untuk organisasi Karang Taruna sendiri pada dasarnya sudah memiliki gedung yang dijadikan sebagai pusat kegiatan, akan tetapi gedung tersebut belum secara penuh diserah terimakan kepada Karang Taruna. Kondisi ini mengakibatkan gedung yang diperuntukkan untuk kegiatan pemuda Karang Taruna menjadi terbengkalai dan mulai rusak. Dalam setahun ini proses penyerahan gedung dari pihak pembangun ke pihak desa yang nantinya harus diserahkan kepada Karang Taruna kurang diketahui kejelasannya. Keberadaan pihak desa yang dirasa tidak terlalu melibatkan Karang Taruna dalam pengambilan keputusan untuk kegiatan maupun upaya peningkatan kesejahteraan yang sifatnya menyasar warga desa sendiri menjadi sebuah permasalahan yang mengganjal keberadaan eksistensi Karang Taruna agar berperan lebih baik sebagai organisasi pemuda.

Ada beberapa solusi yang bisa diberikan untuk penguatan Karang Taruna yaitu terkait dengan pelatihan kepemimpinan serta pelatihan dalam mencari pendanaan secara mandiri. Keberadaan pelatihan kepemimpinan dirasa sangat penting karena mengarahkan pada upaya untuk regenerasi seorang pemimpin baru dalam organisasi Karang Taruna yang mampu menggerakkan para anggotanya untuk lebih banyak terlibat dalam setiap kegiatan yang ada. Selain latihan kepemimpinan juga dibutuhkan pelatihan terkait dengan pencarian pendanaan. Pelatihan tersebut tidak terlepas dari kebutuhan pemenuhan dukungan pendanaan agar perencanaan kegiatan yang ada dapat dilakukan dalam skala yang lebih besar

dan berjalan secara berkelanjutan dengan memberikan manfaat yang maksimal bagi para anggota maupun masyarakat di desa.

BAB VII

PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

7.1. Program Corporate Social Responsibility

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bagian dari kewajiban dan tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007. Tanggung jawab ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjalankan peran aktif untuk menyukseskan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk mampu memberikan peningkatan kehidupan dan lingkungan yang dapat memberikan manfaat bagi dan tentu saja lingkungan masyarakat sekitar.

Tabel 7.1. Mekanisme dan Perencanaan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Penanggung Jawab
a.	Pengumpulan data dapat dilakukan melalui *social mapping*.	Universitas Paramadina
b.	Menetapkan ruang lingkup program terkait program, maksud, tujuan, lokasi, waktu, dan sasaran penerima manfaat.	Universitas Paramadina
c.	Menyusun estimasi biaya masing-masing kegiatan CSR yang disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai otorisasi.	Perusahaan
d.	Menetapkan indikator keberhasilan program.	Universitas Paramadina
e.	Menyelenggarakan rapat koordinasi perencanaan program.	PT Kinerja Maju Sejahtera
f.	Menyusun Rencana Kerja CSR.	Universitas Paramadina

7.2. Program Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan-PROPER

Program Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disebut Proper adalah program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No 6 Tahun 2013. Namun berdasarkan Pasal 8, Peraturan tersebut, kriteria penilaian aspek pengelolaa lingkungan hidup tidak terbatas pada sistem manajemen lingkungan yang meliputi pemanfaatan sumber daya yang meliputi efisiensi energi, pengurangan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, *reduce, reuse,* dan *recycle,* pengurangan pencemar udara, konservasi dan penurunan beban pencemaran air dan perlindungan keanekaragaman hayati, namun juga dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaporan ini, Universitas Paramadina berperan dalam menyiapkan pemetaan sosial pada No 4 yang juga sekaligus menjadi bahasan dalam analisis. Adapun tahapan dalam penyusunan program kerja terkait dengan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kriteria penilaian Proper sebagai berikut.

Tabel 7.2. Kriteria Penilaian PROPER

No	Aspek Penilaian	Kriteria	Penanggung Jawab
1.	Kebijakan Pengembangan Masyarakat	a. Terdapat kebijakan kriteria tertulis mengenai pengembangan masyarakat di unit yang dinilai. b. Terdapat sistem tata kelola program pengembangan masyarakat.	Perusahaan
2.	Struktur dan Tanggung Jawab	a. Terdapat struktur yang secara tertulis memiliki tugas dan fungsi khusus untuk melaksanakan pengembangan masyarakat. b. Kualifikasi sumber daya manusia yang melaksanakan pengembangan masyarakat (tingkat pendidikan yang relevan dengan pengembangan masyarakat). c. Rasio jumlah sumber daya manusia di unit/bagian yang khusus melaksanakan pengembangan masyarakat dengan	Perusahaan

No	Aspek Penilaian	Kriteria	Penanggung Jawab
		keseluruhan sumber daya manusia di unit yang dinilai.	
3.	Alokasi dana pengembangan masyarakat.	a. Realisasi dana pelaksanaan pengembangan masyarakat selama tiga tahun berturut-turut. b. Menyampaikan data perbandingan dana pengembangan masyarakat dengan laba unit satu tahun terakhir.	Perusahaan
4.	Perencanaan	Pemetaan sosial meliputi: a. Memiliki dokumen pemetaan sosial yang disusun maksimal 1 tahun terakhir. b. Melengkapi dokumen pemetaan sosial yang diperbarui 1 tahun terakhir. c. Dokumen pemetaan sosial mencakup: 1) Pemetaan aktor (stakeholder) dan jaringan hubungan antar aktor yang terdiri atas individu, kelompok dan organisasi. 2) Deskripsi posisi sosial dan peranan sosial aktor dalam kehidupan masyarakat. 3) Analisis derajat kekuasaan (power) dan kepentingan (interest) aktor. 4) Identifikasi mekanisme atau forum-forum yang menjadi sarana yang digunakan masyarakat dalam membahas kepentingan umum/publik. 5) Deskripsi potensi penghidupan berkelanjutan yang mencakup potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, modal sosial, modal keuangan, kondisi dan insfrastruktur publik. 6) Analisis kebutuhan masyarakat untuk mendukung penghidupan berkelanjutan. 7) Deskripsi jenis-jenis kerentanan dan kelompok rentan. 8) Deskripsi Masalah Sosial 9) Rekomendasi Program	Universitas Paramadina
		Perencanaan strategis dan rencana kerja pengembangan masyarakat. Perencanaan Strategis meliputi: a. Proses penyusunan renstra yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan perusahaan lain.	Perusahaan

No	Aspek Penilaian	Kriteria	Penanggung Jawab
		b. Perencanaan strategis pengembangan masyarakat mencakup visi, misi, tujuan, analisis isu strategis pengembangan masyarakat, program jangka panjang yang dirinci dalam program tahunan, indikator program yang terukur, kebutuhan anggaran untuk pembiayaan program, target sasaran program, dan program menjawab kebutuhan kelompok rentan. Rencana Kerja Tahunan meliputi: a. Proses penyusunan rencana kerja melibatkan pihak-pihak yang terkait yaitu masyarakat, pemerintah, dan perusahaan lain. b. Program yang dideskripsikan dalam kegiatan-kegiatan. c. Indikator-indikator kegiatan yang terukur. d. Jadwal pelaksanaan kegiatan. e. Anggaran masing-masing kegiatan. f. Target sasaran kegiatan.	
5.	Implementasi	Kesesuaian implementasi dengan rencana kerja a. Program dan kegiatan. b. Indikator kegiatan. c. Jadwal pelaksanaan kegiatan. d. Anggaran masing-masing kegiatan. e. Target sasaran program Implementasi program dan kegiatan yang tidak direncanakan. Partisipasi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan.	Perusahaan
6.	Monitoring dan evaluasi	a. Memiliki sistem tata kelola monitoring dan evaluasi pengembangan masyarakat. b. Partisipasi pihak-pihak terkait dalam monitoring dan evaluasi. c. Memiliki bukti tertulis proses dan hasil monitoring secara berkala. d. Memiliki dokumen evaluasi yang disahkan oleh pimpinan tertinggi di unit yang dinilai. e. Dokumen evaluasi yang meliputi: 1) 75% program dan kegiatan dengan rencana kerja tahunan. 2) 75% indikator kegiatan sesuai	Perusahaan

No	Aspek Penilaian	Kriteria	Penanggung Jawab
		dengan indikator yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan. 3) 75% pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal dalam rencana kerja tahunan. 4) 75% realisasi anggaran sesuai dengan alokasi anggaran dalam rencana kerja tahunan. 5) 75% penerima program dan kegiatan sesuai dengan target sasaran dalam rencana kerja tahunan. 6) Buku perbaikan program dan kegiatan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. 7) Memiliki indeks kepuasan masyarakat terkait dengan program pengembangan masyarakat. 8) Lahirnya institusi ekonomi dan atau institusi sosial, keberlanjutan institusi dan perkembangan institusi sebagai dampak program pengembangan masyarakat. 9) Kelompok sasaran menerapkan pengetahuan/keterampilan yang diperoleh dalam program pengembangan masyarakat. 10) Kelompok sasaran mampu menyebarluaskan pengetahuan/keterampilan kepada pihak-pihak lain.	
7.	Hubungan sosial (internal dan eksternal)	Internal a. Adanya serikat kerja b. Memiliki perjanjian kerja bersama. c. Memiliki sistem tata kelola penyelesaian perselisihan hubungan kerja. d. Catatan perselisihan hubungan kerja 2 tahun terakhir. e. Menunjukkan penurunan perselisihan hubungan kerja 2 tahun terakhir. Eksternal a. Memiliki sistem tata kelola penyelesaian konflik dengan pihak-pihak terkait. b. Memiliki catatan konflik dengan pihak-pihak terkait. c. Menunjukkan bukti penurunan konflik	Perusahaan

No	Aspek Penilaian	Kriteria	Penanggung Jawab
		dengan pihak-pihak terkait selama 2 tahun terakhir.	
8.	Publikasi dan Penghargaan	Menunjukkan inovasi di bidang pengembangan masyarakat dalam waktu dua tahun terakhir melalui: a. Inovasi diseminasi melalui jurnal internasional. b. Inovasi diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional. c. Memperoleh penghargaan dalam bidang masyarakat minimal pemerintah di tingkat Kabupaten atau Lembaga Non-Pemerintah.	Perusahaan

BAB VIII

PEMETAAN AKTOR

8.1 Aktor

a. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan kepanjangan dari pemerintahan daerah khususnya kecamatan dan kepala dusun. Baik Kecamatan maupun kepala dusun berkomitmen untuk mendukung kinerja aparatur kelurahan dalam pelaksanaan tugas pemerintah, menjalankan koordinasi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan; dan mendukung kegiatan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika melakukan wawancara, **Ibu** Titin Wahyuni sebagai Camat Kecamatan Pasir Sakti menemani.

Gambar 8.1 Ibu Camat Kecamatan Pasir Mukti

Gambar 8.2. Wawancara dengan Kepala Dusun

b. Rukun Tetangga

Rukun Tetangga merupakan unit terkecil di bawah Kelurahan yang berhubungan dengan masyarakat. Masing-masing Rukun Tetangga menjadi pemediasi antara masyarakat dan Kelurahan. Pada saat wawancara, Ketua RT 13 (Bapak Ghofur), Ketua RT 14 (Bapak Wahyono), Ketua RT 15 (Bapak Nuryadi), Ketua RT 21 (Bapak Wayan) juga hadir. Ruang lingkup kegiatan lebih mengutamakan membantu terciptanya ketenteraman dan ketertiban antar warga, melayani masyarakat dan mengutamakan musyawarah mufakat. Peran Rumah Tangga di Desa Mekar Sari cukup aktif. Peran mereka terlibat dalam pemberdayaan masyarakat melalui fokus perhatian pada kondisi tingkat perekonomian yang ada, tingkat kriminalitas, pekerjaan, dan peran masyarakat.

c. Karang Taruna

Karang Taruna bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan yang bisa mendukung pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda, dan memperkuat masyarakat terutama generasi muda namun perannya belum optimal di Desa Mekar Sari. Keberadaan Karang Taruna menjadi salah satu organisasi yang mengarahkan pada pemberdayaan pemuda di wilayah ini. Organisasi Karang Taruna hingga saat

ini memiliki anggota yang berjumlah kurang lebih 100 orang. Keberadaan Karang Taruna ini pada dasarnya juga mendapai beberapa masalah yaitu terkait dengan tidak sedikitnya anggota Karang Taruna tidak aktif secara maksimal.

d. PT Kinerja Maju Sejahtera

PT Kinerja Maju Sejahtera berencana berperan untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan di Desa Mekar Sari, namun, peran perusahaan belum optimal di Desa Mekar Sari.

Tabel 8.2. Analisis Stakeholder Desa Mekar Sari

Stakeholder	Deskripsi	Derajat	
		Kekuatan (Power)	Interest (Kepentingan)
Kecamatan Pasir Sakti dan Kepala Dusun Mekar Sari	Menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan sesuai peraturan yang berlaku dan menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat.	**Tinggi**	**Tinggi**
Rukun Tetangga	Mendukung program Pemerintah dengan berkontribusi pada pengelolaan lingkungan dan program sosial.	**Tinggi**	**Tinggi**
Karang Taruna	Menyelenggarakan kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda.	**Rendah**	**Rendah**
PT Kinerja Maju Sejahtera	Unit yang juga nantinya bertanggung jawab untuk mendukung kegiatan di Desa Mekar Sari.	**Tinggi**	**Tinggi**

8.1.1. Deskripsi Posisi Sosial dan Peranan Sosial Aktor

a. **Ibu Titin** sebagai Camat Kecamatan Pasir Sakti. Keberadaan kecamatan sebagai sebuah institusi pada dasarnya lebih kepada penggerak program yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah. Keberadaan kecamatan nantinya akan memfasilitasi program-program tersebut agar bisa terlaksana dengan baik di wilayahnya.

b. **Kepala Dusun.** Memiliki fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama untuk pemanfaatan lahan galian, mendukung kegiatan sosial.

c. **Ketua Rukun Tetangga**. Ketua RT 13 (Bapak Ghofur), Ketua RT 14 (Bapak Wahyono), Ketua RT 15 (Bapak Nuryadi), Ketua RT 21 (Bapak Wayan) memiliki perhatian pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Mekar Sari. Fokus perhatian pada pemanfaatan lahan galian, mengurangi kriminalitas, peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d. **Pengelola Karang Taruna**. Pengelola Karang Taruna bisa menjadi agen perubahan untuk menggerakan masyarakat agar bisa memiliki keterampilan yang menambah kemampuan mereka untuk bekerja dengan lebih baik. Keterampilan ini dibutuhkan terkait kemampuan untuk mengelola sumber daya alam sekitar dan yang mendukung pengelolaan lahan galian.

e. **PIC PT Kinerja Maju Sejahtera** sebagai perwakilan perusahaan**.** Ia bertanggung jawab untuk pelaksanaan CSR yang dicanangkan oleh perusahaan. Social mapping ini menjadi awal dari pembuatan atau rencana strategis CSR di wilayah Kecamatan Pasir Mukti Desa Mekar Sari Lampung Timur.

8.1.2. Analisis Derajat Kekuatan (power) dan Kepentingan (interest) Aktor

Tabel 8.1 Derajat Kekuatan dan Kepentingan Aktor di Desa Mekar Sari

Stakeholder	Deskripsi	Derajat	
		Kekuatan(Power)	Interest (Kepentingan)
Ibu Titin	Sebagai Camat yang memfasilitasi berjalannya program-program.	**Tinggi**	**Tinggi**
PIC Kepala Dusun	Sebagai pihak mengoptimalkan peran masyarakat.	**Tinggi**	**Tinggi**
Ketua RT 13 (Bapak Ghofur), Ketua RT 14 (Bapak Wahyono), Ketua RT 15 (Bapak Nuryadi), Ketua RT 21 (Bapak Wayan)	Sebagai penggerak kegiatan atau program yang dicanangkan oleh pihak Kecamatan dan Kepala Dusun.	**Rendah**	**Tinggi**
PIC Karang Taruna	Sebagai pihak yang menggerakan pemuda untuk berpartisipasi.	**Rendah**	**Rendah**
PIC Perusahaan	Merupakan perwakilan dari perusahaan.	**Tinggi**	**Tinggi**

Berdasarkan peta Kekuatan (power) dan Kepentingan (interest) para aktor yang terlibat, bisa dibagi menjadi empat bagian yaitu stakeholder dengan Kekuatan Tinggi dan Kepentingan Tinggi dan stakeholder dengan Kekuatan Rendah dan Kepentingan Tinggi. Hasil analisis derajat Kekuatan dan Kepentingan menunjukkan bahwa baik pihak Kecamatan, Kepada Dusun, Ketua Rukun Tetangga dan PT Kinerja Maju Sejahtera memiliki posisi yang kuat dalam dua aspek tersebut. Kecamatan, Kepala Dusun dan Ketua Rukun Tetangga memiliki tanggung jawab besar untuk memajukan daerahnya agar mendapatkan tingkat kehidupan ekonomi yang baik bagi para warga masyarakatnya. Program yang akan dilaksanakan ini

sifatnya kolaboratif karena membutuhkan pendanaan yang banyak dengan memanfaatkan sumber daya yang ada demi kepentingan masyarakat lebih luas. Pemberdayaan eknomomi menjadi kunci kesejahteraan warga lokal. Apabila kesejahteraan ekonomi sudah terpenuhi, maka warga lokal mampu melakukan peningkatan di bidang pendidikan dan juga kesehatan.

8.1.3. Kelompok Rentan

Kelompok rentan biasanya dikaitkan dengan rendahnya kesejahteraan masyarakat atau lemahnya kemampuan ekonomi. Identifikasi kelompok rentan ini bisa diperoleh data sekunder dari Laporan Tahunan Kelurahan yang menjadi sasaran Program CSR Perusahaan. Mayoritas pekerjaan yang dilakukan oleh warga terdiri atas buruh, petani, tukang, pedagang. Rata-rata pendidikan terakhir masyarakatnya adalah SMP sampai SMA. Hanya sedikit yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi ataupun lulusan sarjana. Rata-rata setiap KK mempunyai satu kendaraan bermotor roda dua yang juga merupakan transportasi utama sehari-hari.

8.1.4. Jaringan Sosial

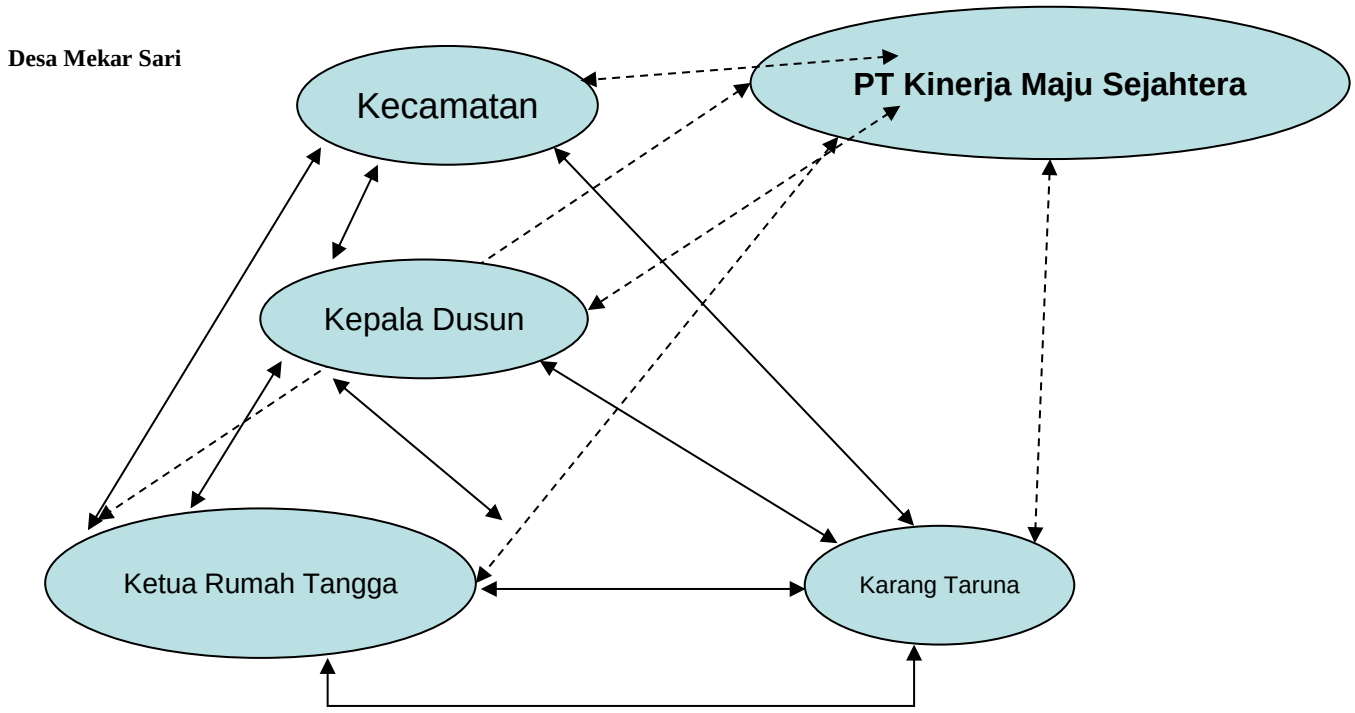

——— Garis saling mengenal/saling membutuhkan
------ Garis putus-putus belum mengenal dan saling membutuhkan

Gambar 8.1. Jaringan Sosial Aktor di Desa Mekar Sari

Gambar 8.1. menunjukkan hubungan atau jarian sosial aktor di Desa Mekar Sari. Perusahaan PT Kinerja Maju Sejahtera memiliki hubungan tidak langsung dalam menjalankan Program CSR. Pihak perangkat desa lah yang langsung memiliki hubungan langsung untuk melakukan koordinasi dengan pihak perangkat desa termasuk antar Kecamatan, Desa, Ketua Rukun Tetangga dan Karang Taruna. Dengan demikian, Program CSR ini nantinya akan ditujukan kepada perangkat desa untuk dikelola langsung.

BAB IX

Rekomendasi Program

9.1. Internal Perusahaan

a. **Pelaksana yang Profesional.** Penyelenggaraan Program CSR perlu didukung dengan pengelolaan berdasarkan profesionalisme dan komitmen yang tinggi. Artinya, PT Kinerja Maju Sejahtera perlu menempatkan orang-orang yang memiliki pengetahuan baik terkait dengan penerapan Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial sekaligus berusaha untuk memberikan dukungan terbaik terhadap penyelenggaraan CSR. Hal ini mempertimbangkan bahwa perusahaan belum pernah berinteraksi dengan masyarakat di Desa Mekar Sari terkait dalam pelaksanaan kegiatan CSR. Pengelola CSR di PT Kinerja Maju Sejahtera perlu juga mempelajari adat istiadat sekaligus pola komunikasi dan peta aktor atau pemuka desa agar bisa berinteraksi dengan baik.

b. **Komitmen PT Kinerja Maju Sejahtera.** Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial, kegiatan ini perlu didahului dengan program Pemetaan Sosial. Program ini penting karena bisa mengetahui potensi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat agar program-program yang diusulkan oleh perusahaan bisa tepat sasaran. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk bisa memberikan dana terkait pelaksanaan program agar mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tempat perusahaan beroperasi.

c. **Adanya Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan CSR**. Kegiatan CSR atau Tanggung Jawab Lingkungan Sosial ini diharapkan dapat dituliskan dalam bentuk dokumentasi dan publikasi. Dokumentasi dan publikasi ini penting karena bisa menjadi panduan yang bisa dijadikan arahan dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program CSR selanjutnya sekaligus menjadi benchmark. Publikasi kegiatan CSR bertujuan untuk mendistribusikan informasi kegiatan CSR kepada para *stakeholder* perusahaan yang nantinya bisa menciptakan persepsi positif terhadap reputasi perusahaan di masa yang akan datang.

9.2. Eksternal Perusahaan

a. **Diskusi dan Komunikasi intensif**. Pelaksanaan CSR di Desa Mekar Sari merupakan kegiatan yang belum pernah dilakukan oleh PT Kinerja Maju Sejahtera di daerah tersebut. Agar bisa melaksanakan kegiatan atau program baik di daerah tersebut, perlu adanya komunikasi eksternal dengan para pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah lokal, tokoh masyarakat, karang taruna atau forum-forum rumah tetangga sekaligus berdiskusi intensif untuk memahami hasil *social mapping* yang diwujudkan dalam program CSR. Diskusi ini diharapkan mampu berperan sebagai media untuk mengenal dan memahami secara lebih baik dengan para penerima Program CSR nantinya. Komunikasi eksternal yang dibangun ini akan memfasilitasi nantinya PT Kinerja Maju Sejahtera dalam melaksanakan program-program yang diusulkan berdasarkan hasil studi pemetaan sosial.

b. **Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Setempat**. Untuk memudahkan pelaksanaan program CSR, PT Kinerja Maju Sejahtera melakukan koordinasi

yang baik dengan Pemerintah setempat. Hal ini mempertimbangkan adanya kemungkinan kolaborasi ataupun berbagi sumber daya yang ada. Dengan kooridnasi ini, diharapkan agar mencapai kesesuaian antara pembangunan di keempat Kelurahan dan program CSR PT Kinerja Maju Sejahtera.

9.3. Usulan Program Per Kelurahan

Usulan program yang bisa dijadikan sebagai bagian Program Tanggung Jawab Sosial adalah terkait aspek-aspek yang diusulkan sebagai tujuan dari pemetaan sosial dalam studi ini. Program unggulan yang diusulkan berasal dari masing-masing kelurahan terkait dengan **1) perbaikan infrastruktur; 2) revitalisasi lahan galian; 3) pemanfaatan potensi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, dan 4) penguatan Karang Taruna.**

Latar Belakang

Program perbaikan infrastruktur menjadi program penting karena merupakan jalur lalu lintas para masyarakat dari suatu daerah ke daerah yang segera dilaksanakan. Hal ini akan memperlancar transportasi dan distribusi barang atau produk sehingga akan meningkatkan efisiensi dan keefektifan kerja. Untuk mendukung peningkatan dan optimalisasi sumber daya, perlu ada program revitalisasi lahan galian. Bekas lahan galian pertambangan dijadikan lahan seperti semula agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak menyisakan dampak negatif terkait pencemaran tanah. Lahan galian diremajakan untuk bisa dimanfaatkan sebagai tempat pengolahan ikan atau udang. Selain itu, bisa dioptimalkan untuk daerah wisata.

Desa Mekar Sari juga memiliki potensi sumber daya alam lain yaitu perkebunan, pertanian, perikanan, dan bahkan peternakan. Program pemanfaatan sumber daya alam ini perlu dilakukan pendampingan untuk pemanfaatan yang dapat meningkatkan nilai tambah termasuk pemasaran dan distribusi. Pelaksanaan program-program yang diusulkan tersebut akan diperkuat dengan keberadaan Karang Taruna. Keberadaan Karang Taruna ini akan memberikan penguatan pelatihan bagi para masyarakat untuk mendapatkan keahlian yang nantinya digunakan dalam memanfaatkan hasil program revitalisasi lahan galian dan pemanfaatan sumber daya alam.

Tujuan

a. Memperbaiki infrastruktur jalan sepanjang penggalian tambang pasir.
b. Melakukan revitalisasi lahan bekas galian.
c. Memberikan wawasan terkait dengan pengelolaan sektor wisata.
d. Memberikan wawasan terkait budidaya udang dan ikan.
e. Memberikan pelatihan pengelolaan hasil ternak yaitu telur dan daging.
f. Memberikan pelatihan pengelolaan, pemasaran, dan distribusi sumber daya alam yang ada, khususnya jagung dan kelapa.
g. Memberikan pelatihan kepemimpinan untuk mengembangkan karakter dan keahlian kewirausahaan pada Karang Taruna.

Pelaksanaan Program

a. Perbaiki jalan dekat area lahan pertambahan.
b. Revitalisasi lahan bekas galian.
c. Pelatihan terkait dengan pengelolaan sektor wisata.

d. Pelatihan pengelolaan budidaya udang dan ikan.

e. Pemberian pelatihan terkait dengan pengelolaan pengelolaan, pemasaran, dan distribusi sumber daya alam yang ada, khususnya jagung dan kelapa.

f. Pelatihan kepemimpinan untuk mengembangkan karakter dan keahlian kewirausahaan pada Karang Taruna.

Durasi, Lingkup dan Sasaran Pekerjaan

a. Durasi pengerjaan program selama 2 tahun.
b. Lingkup program terkait dengan pemberian pelatihan dan modal.
c. Sasaran program adalah masyarakat Desa Mekar Sari.

Monitoring Program

a. Monitoring dilakukan setiap bulan dengan mitra yang dipilih oleh PT Kinerja Maju Sejahtera setiap bulan.
b. Monitoring dilakukan setiap 6 bulan oleh PT Kinerja Maju Sejahtera.

Indikator Pencapaian Program

a. Ada perbaikan jalan.
b. Ada revitalisasi lahan bekas galian.
c. Program pariwisata.
d. Keragaman hasil perikanan dan peternakan.
e. Ada pengolahan sumber daya alam.
f. Tambahan penghasilan masyarakat.
g. Partisipasi aktif para masyarakat.

9.4. Usulan Program Berdasarkan Prioritas Kepentingan

Berdasarkan program yang sudah diusulkan terdapat 6 program unggulan. Program unggulan tersebut adalah

1) Perbaikan jalan dekat area lahan pertambahan.
2) Revitalisasi lahan bekas galian.
3) Pelatihan terkait dengan pengelolaan sektor wisata.
4) Pelatihan pengelolaan budidaya udang dan ikan.
5) Memberikan pelatihan pengelolaan hasil ternak yaitu telur dan daging.
6) Pemberian pelatihan terkait dengan pengelolaan pengelolaan, pemasaran, dan distribusi sumber daya alam yang ada, khususnya jagung dan kelapa.
7) Pelatihan kepemimpinan untuk mengembangkan karakter dan keahlian kewirausahaan pada Karang Taruna.

Dari 7 (tujuh) program yang diunggulkan, laporan ini menampilkan urutan program berdasarkan prioritas. Skala prioritas ini didasarkan pada sejumlah aspek yaitu sejauh mana program dirasakan dapat memberikan manfaat ekonomi dan penghidupan masyarakat lebih baik serta pertimbangan efisiensi biaya. Penilaian skala setiap aspek kepentingan pada program memiliki rentang 1 (sangat tidak penting)-10 (sangat penting). Bobot untuk manfaat sebesar 60% dan bobot untuk biaya sebesar 40%. Tabel berikut merupakan skala prioritas setiap program.

Tabel 9.1. Prioritas Program

No	Program	Penilaian Manfaat (kali 60%)	Penilaian Biaya (kali 40%)	Total Bobot	Prioritas Program	Lama Program (dalam bulan)
1.	Perbaikan jalan dekat area lahan	9	8	8,6	2	6

	pertambahan					
2.	Revitalisasi lahan bekas galian	8	10	8,8	1	12
3.	Pelatihan terkait dengan pengelolaan sektor wisata	7	6	6,6	6	2
4.	Pelatihan pengelolaan budidaya udang dan ikan	8	6	7,2	3	2
5.	Pelatihan pengelolaan hasil ternak yaitu telur dan daging.	8	5	6,8	5	
6.	Pemberian pelatihan terkait dengan pengelolaan pemasaran, dan distribusi sumber daya alam yang ada, khususnya jagung dan kelapa	8	5	6,8	4	2
7.	Pelatihan kepemimpinan untuk mengembangkan karakter dan keahlian kewirausahaan pada Karang Taruna.	8	4	6,4	7	2

9.5. Timeline Program Unggulan

Tahapan Pekerjaan	Aktor	Rencana Kerja	Bulan dalam Tahun 2018												Bulan dalam Tahun 2019											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan	Kecamatan & Kepala Dusun (aparat pemerintah)	Diskusi awal																								
		Penandatangan PKS dengan PT Kinerja Maju Sejahtera																								
	PT Kinerja Maju Sejahtera	Pemberian modal awal bila ada																								
Perbaikan Jalan	Kecamatan & Kepala Dusun& Perusahaan	Perbaikan infrastruktur																								
Revitalisasi lahan bekas galian	Kecamatan & Kepala Dusun& Perusahaan	Revitalisasi lahan bekas galian																								
Pelatihan terkait dengan pengelolaan sektor wisata	Aparat Pemerintah	Pelatihan awal terkait pemanfaatan, pengelolaan, dan pemberdayaan.																								
		Pendampingan materi.																								
Pelatihan pengelolaan budidaya udang dan ikan	Aparat Pemerintah	Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan.																								
		Pendampingan materi.																								
Pelatihan pengelolaan hasil ternak yaitu telur	Aparat Pemerintah	Pelatihan ternak untuk pengelolaan daging dan telur																								

Tahapan Pekerjaan	Aktor	Rencana Kerja	Bulan dalam Tahun 2018												Bulan dalam Tahun 2019											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dan daging.		Pendampingan materi																								
Pelatihan terkait dengan sumber daya alam	Aparat Pemerintah	Pemberian pelatihan terkait dengan pengelolaan pemasaran, dan distribusi sumber daya alam yang ada, khususnya jagung dan kelapa																								
		Pendampingan Materi																								
Pelatihan karakter dan keahlian	Karang Taruna	Pelatihan kepemimpinan untuk mengembangkan karakter dan keahlian kewirausahaan.																								
		Pendampingan Materi																								
Monitoring & Evaluation	Aparat Pemerintah & Karang Taruna	Monitoring dan evaluasi program																								
	PT Kinerja Maju Sejahtera	Monitoring dan evaluasi program																								
		Penilaian Indikator Kerja	- Ada diskusi awal dengan Kecamatan atau Kepala Dusun Kelurahan. - Penandatangan PKS dengan Kelurahan. - Pemberian dana awal. - Terselenggaranya pelatihan. - Adanya usulan program pariwisata - Survei kepuasan masyarakat.												-	- Terselenggararanya pelatihan. - Pemberian dana awal. - Survei kepuasan masyarakat.											